



PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TIMUR

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH

LKJIP 2022

DINAS PERUMAHAN
RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN CIPTA
KARYA

 www.pucktr.jatimprov.go.id

 [dprkpciptakarya](https://www.instagram.com/dprkpciptakarya)

 [dinas perumahan rakyat jatim](https://www.facebook.com/dinas.perumahan.rakyat.jatim)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur tahun 2022 telah dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Kinerja dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur sesuai dengan tugas dan fungsinya sejak awal sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022.

Selain itu, laporan akuntabilitas ini juga berperan sebagai alat kendali dan penilaian kualitas kinerja secara terukur, serta alat untuk mendorong peningkatan kinerja demi terwujudnya pemerintahan yang akuntabel di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur. Ungkapan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras melakukan segala daya dan upaya terselesaikannya laporan kinerja ini. Demikian laporan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab, semoga bermanfaat.

Surabaya, 17 Januari 2023

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TIMUR**



L. NYOMAN GUNADI, S.T., M.T.

Pembina Tingkat I

NIP. 19690726 199903 1 006



IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, bidang pertanahan dan sub urusan air minum, persampahan, air limbah, drainase permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya dan penataan ruang yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Gubernur serta mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di bidang Perumahan, Permukiman, Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta tugas pembantuan dan dekonsentrasi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, serta Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2019 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur.

Laporan Kinerja menggambarkan dinamika Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur sejak awal sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022 dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban terhadap penggunaan seluruh sumber daya, memuat upaya, dan metode yang dilaksanakan dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau gab Kinerja. Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur tahun 2022 disajikan sebagai berikut:

1. Sasaran persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni dengan target 69,80% terealisasi sebesar 66,28% atau dengan capaian 87,88% termasuk dalam katagori baik. Realisasi sasaran persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni sebesar 66,28% didukung oleh 16 (enam belas) program yang mendukung tercapainya target tersebut yaitu:
 - 1). Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 - 2). Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
 - 3). Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
 - 4). Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
 - 5). Program Pengembangan Permukiman
 - 6). Program Penataan Bangunan Gedung
 - 7). Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
 - 8). Program Pengembangan Jasa Konstruksi
 - 9). Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - 10). Program Pengembangan Perumahan
 - 11). Program Kawasan Permukiman
 - 12). Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
 - 13). Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
 - 14). Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
 - 15). Program Penatagunaan Tanah
 - 16). Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

2. Sasaran persentase kesesuaian rencana tata ruang dengan target 88,00% terrealisasi sebesar 92,53% atau dengan capaian 94,51% termasuk dalam katagori sangat baik. Realisasi sasaran persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni sebesar 92,53% didukung oleh 4 (empat) program yang mendukung tercapainya target tersebut yaitu :
 - 1). Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - 2). Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
 - 3). Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
 - 4). Program Penatagunaan Tanah

3. Sasaran Nilai Evaluasi Layanan implementasi SAKIP perangkat daerah dengan target 87,59%, sedangkan realisasi 85,11% atau tercapai 93,95% termasuk kategori baik. Realisasi sasaran persentase Nilai Evaluasi Layanan implementasi SAKIP perangkat daerah sebesar 85,11 didukung oleh 1 (satu) program yang mendukung tercapainya target tersebut yaitu, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GRAFIK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
I.A. STRUKTUR ORGANISASI	1
I.B. TUGAS DAN FUNGSI	3
I.C. ISU STRATEGIS	8
I.D. CASCADING KINERJA (KETERHUBUNGAN DENGAN RPJMD)	18
I.E. PETA PROSES BISNIS	24
I.F. RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI	26
BAB II PERENCANAAN KINERJA	28
II.A. RENCANA STRATEGIS 2019-2024	28
II.B. TUJUAN DAN SASARAN	30
II.C. ARAH KEBIJAKAN	31
II.D. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)	34
II.E. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022	35
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	36
III.A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2022	36
III.B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	37
III.C. REALISASI ANGGARAN	86
III.D. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2021	93
BAB IV PENUTUP	96

DAFTAR GAMBAR



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur.....	2
Gambar 1.2. Cascading Kinerja	22
Gambar 1.3. Peta Proses Bisnis	24

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Pendidikan	7
Tabel 1.2.	Jumlah Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kerja Menurut Kualifikasi Pendidikan	7
Tabel 1.3.	Jumlah Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan.....	7
Tabel 1.4.	Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.....	7
Tabel 2.1.	Matriks Hubungan antara Tujuan dan Sasaran	31
Tabel 2.2.	Rencana Kinerja Tahun 2022	34
Tabel 3.1.	Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2022	36
Tabel 3.2.	Pencapaian Kinerja Tujuan Tahun 2022	37
Tabel 3.3.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Tahun 2021 dan 2022	38
Tabel 3.4.	Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kontribusi Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Hunian Dan Permukiman Yang Layak Tahun 2022.....	38
Tabel 3.5.	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kontribusi Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Hunian Dan Permukiman Yang Layak Tahun 2021 dan 2022	38
Tabel 3.6.	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kontribusi Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Hunian Dan Permukiman Yang Layak Tahun 2022 dengan Target Akhir Periode Renstra 2024	39
Tabel 3.7.	Alokasi Anggaran Sasaran Meningkatnya Kontribusi Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Hunian Dan Permukiman Yang Layak Tahun 2022.....	39
Tabel 3.8.	Pencapaian Kinerja Dan Anggaran Sasaran Meningkatnya Kontribusi Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Hunian Dan Permukiman Yang Layak Tahun 2022	39
Tabel 3.9.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	40
Tabel 3.10.	Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur	41
Tabel 3.11.	Jumlah perumahan yang dibantu pembangunan PSU nya untuk mendukung terwujudnya rumah bersubsidi di Jawa Timur Tahun 2015-2022	41
Tabel 3.12.	Jumlah rumah tangga di Jawa Timur menurut status kepemilikan tempat tinggalnya Tahun 2022	42

Tabel 3.13.	Renovasi Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2009-2022.....	44
Tabel 3.14.	Jumlah desa rawan kekeringan Jawa Timur yang ditangani Tahun 2014-2022	45
Tabel 3.15.	Jumlah rumah tangga di Jawa Timur yang memiliki akses air minum layak Tahun 2022	47
Tabel 3.16.	Persentase RT yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak menurut Provinsi dan Kab/kota, 2022	49
Tabel 3.17.	Luas Kawasan Kumuh Perkotaan Sesuai SK Bupati/Walikota	51
Tabel 3.18.	Program/Kegiatan Pendukung sasaran meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak Tahun 2022..	53
Tabel 3.19.	Pencapaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Yang Berkelanjutan Tahun 2022.....	58
Tabel 3.20.	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Yang Berkelanjutan Tahun 2021 dan 2022.....	58
Tabel 3.21.	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Yang Berkelanjutan Tahun 2022 dengan Target Akhir Periode Renstra 2024	58
Tabel 3.22.	Alokasi Anggaran Sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Yang Berkelanjutan Tahun 2022.....	59
Tabel 3.23.	Pencapaian Kinerja Dan Anggaran Sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Yang Berkelanjutan Tahun 2022	59
Tabel 3.24.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	59
Tabel 3.25.	Progres Penetapan Perda RTRW Kabupaten/Kota Tahun 2022	61
Tabel 3.26.	Program/Kegiatan Pendukung sasaran terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan Tahun 2022.....	63
Tabel 3.27.	Analisis Program/Kegiatan Pendukung sasaran Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak Tahun 2022.....	67
Tabel 3.28.	Analisis Program/Kegiatan Pendukung sasaran terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan Tahun 2022	80
Tabel 3.29.	Analisis Program/Kegiatan Pendukung sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Tahun 2022	79
Tabel 3.30.	Capaian PAD Tahun 2022	85
Tabel 3.31.	Akuntabilitas Keuangan Tahun 2022.....	86

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1. Persentase Renovasi Rutilahu Tahun 2022	43
Grafik 3.2. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak Tahun 2022	48
Grafik 3.3. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak Tahun 2022 ...	49
Grafik 3.4. Persentase Tahapan Penetapan Perda RTRW Kabupaten/Kota Tahun 2022.....	62

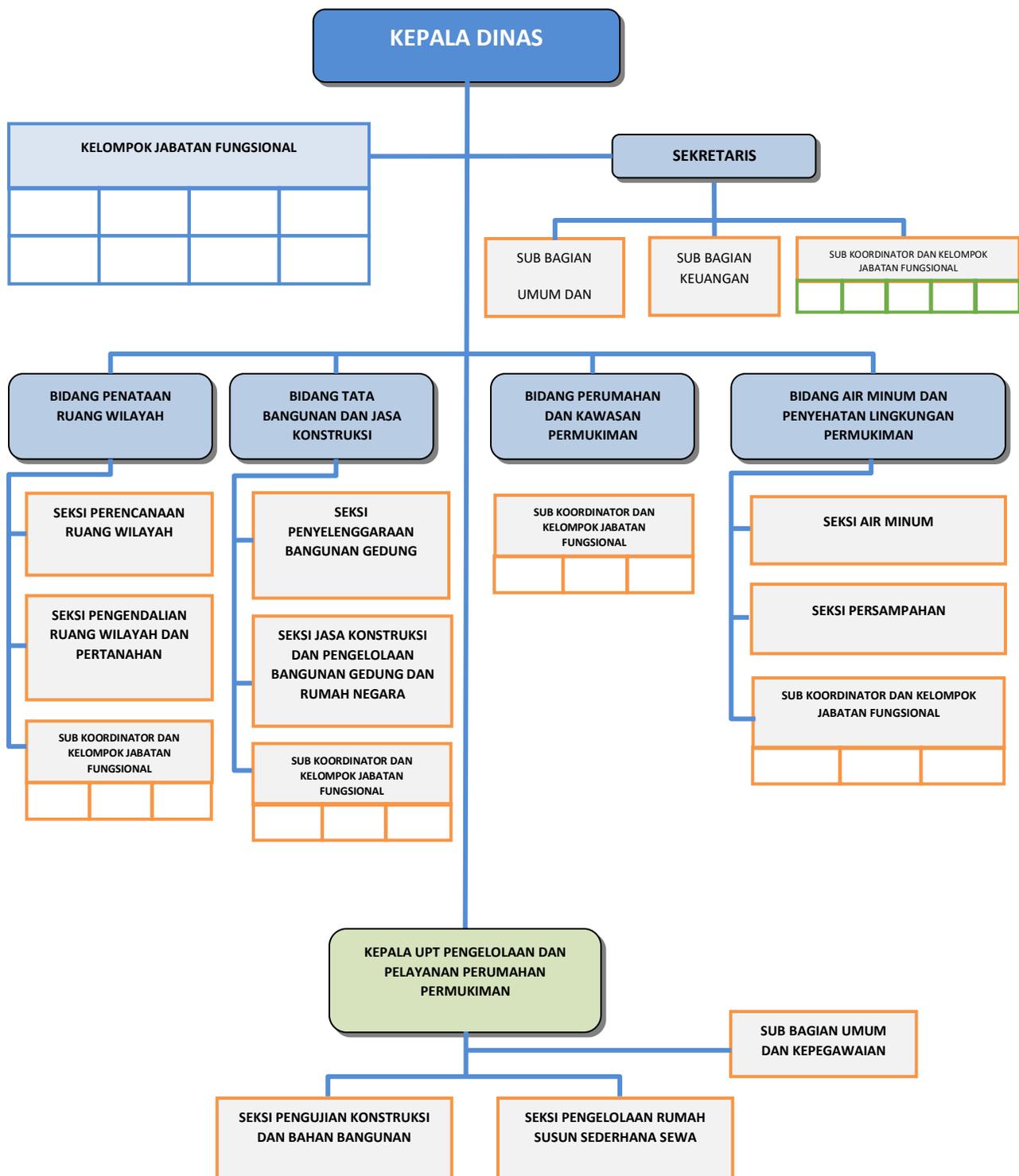
PENDAHULUAN

I.A. STRUKTUR ORGANISASI

Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, bidang pertanahan dan sub urusan air minum, persampahan, air limbah, drainase permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya dan penataan ruang yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di bidang Perumahan Permukiman serta tugas pembantuan dan dekonsentrasi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 84 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, serta Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2019 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur. Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 84 tahun 2019 dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 tahun 2019 sebagaimana terlampir pada gambar 1.A., terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Penataan Ruang Wilayah;
- d. Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi;
- e. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- f. Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman;
- g. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan Permukiman
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1.A. Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur



I.B. TUGAS DAN FUNGSI

Dinas adalah unsur pelaksana urusan Pemerintah Daerah di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, bidang pertanahan dan sub urusan air minum, persampahan, air limbah, drainase permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya dan penataan ruang yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di bidang Permukiman serta tugas pembantuan dan dekonsentrasi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, serta Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2019 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur.

A. KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pertanahan dan sub urusan air minum, persampahan, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jasa konstruksi dan penataan ruang.

B. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan, hubungan masyarakat dan protokol. Sekretariat, mempunyai fungsi:

1. Pengelolaan pelayanan administrasi umum dan perizinan;
2. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
3. Pengelolaan administrasi keuangan;
4. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
5. Pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah;
6. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
7. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;

8. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian;
9. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
10. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
11. Pelaksanaan *monitoring* serta evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
12. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

C. BIDANG TATA BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI

Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengoordinasikan kebijakan tata bangunan dan jasa konstruksi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi, mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi;
2. Pengkoordinasian kebijakan teknis tata bangunan dan jasa konstruksi;
3. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program tata bangunan dan jasa konstruksi;
4. Pelaksanaan dan fasilitasi penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara;
5. Pelaksanaan pembinaan teknis pembangunan bangunan negara;
6. Pelaksanaan pengelolaan rumah negara;
7. Pelaksanaan pengembangan jasa konstruksi;
8. Pelaksanaan pembinaan penataan bangunan dan lingkungan;
9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang tata bangunan dan jasa konstruksi dan;
10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

D. BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengoordinasikan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan rumah khusus, rumah swadaya, rumah umum, rumah komersial, kawasan permukiman kumuh dan prasarana sarana dan utilitas umum;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan rumah khusus, rumah swadaya, rumah umum, rumah komersial, kawasan permukiman kumuh dan prasarana sarana dan utilitas umum;

3. Pengoordinasian kebijakan penyelenggaraan rumah khusus, rumah swadaya, rumah umum, rumah komersial, kawasan permukiman kumuh dan prasarana sarana dan utilitas umum;
4. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, pengawasan, fasilitasi dan bantuan teknis penyelenggaraan rumah khusus, rumah swadaya, rumah umum, rumah komersial, kawasan permukiman kumuh dan prasarana sarana dan utilitas umum;
5. Pelaksanaan strategi penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Provinsi;
6. Pelaksanaan fasilitasi penyediaan rumah umum bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Provinsi;
7. Pelaksanaan fasilitasi penyediaan rumah khusus bagi kawasan nelayan, kawasan perbatasan, dan relokasi bencana;
8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis penyelenggaraan rumah khusus, rumah swadaya, rumah umum, rumah komersial, kawasan permukiman kumuh dan prasarana sarana dan utilitas umum serta rumah tinggal layak huni dan bantuan stimulan perumahan swadaya; dan
9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas.

E. BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengoordinasikan kebijakan air minum dan penyehatan lingkungan permukiman. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis air minum dan penyehatan lingkungan permukiman;
2. Pengoordinasian kebijakan teknis air minum dan penyehatan lingkungan permukiman;
3. Pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan masyarakat, peningkatan peran serta stakeholder didalam pengembangan penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan permukiman pada lintas Kabupaten/Kota, dikawasan permukiman kumuh, kawasan rawan air, area bereksiko sanitasi, kawasan khusus dan kawasan strategis Provinsi;
4. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sistem persampahan regional, pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum lintas daerah Kabupaten/Kota, sistem air limbah domestik regional, sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas daerah Kabupaten/Kota serta pengembangan sistem persampahan regional;

5. Pelaksanaan pembangunan penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan permukiman pada lintas daerah Kabupaten/Kota, kawasan permukiman kumuh, kawasan rawan air, area beresiko sanitasi, kawasan khusus dan kawasan strategis provinsi;
6. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, serta pemberian bantuan teknis dalam penyediaan prasarana dan sarana air minum dan penyehatan lingkungan Permukiman;
7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Air Minum dan penyehatan lingkungan permukiman; dan
8. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

F. BIDANG PENATAAN RUANG WILAYAH

Bidang Penataan Ruang Wilayah mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengoordinasikan penataan ruang wilayah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Penataan Ruang Wilayah mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis penataan ruang wilayah;
2. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penataan ruang wilayah Provinsi;
3. Pelaksanaan Pembinaan penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota;
4. Pelaksanaan perencanaan ruang wilayah Provinsi;
5. Pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah;
6. Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah;
7. Pengoordinasian penyelenggaraan penataan ruang wilayah;
8. Pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi teknis rencana tata ruang Kabupaten/Kota dalam rangka rekomendasi Gubernur;
9. Pelaksanaan urusan pertanahan lintas Kabupaten/Kota;
10. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penataan ruang wilayah dan;
11. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

G. UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PERUMAHAN PERMUKIMAN

UPT Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan Permukiman sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas

di bidang pengujian konstruksi dan bahan bangunan, dan Pelayanan pemeliharaan rusunawa, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas dimaksud UPT Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan Permukiman mempunyai fungsi:

1. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT;
2. Pelayanan pengujian konstruksi dan bahan bangunan;
3. Pelayanan dan pemeliharaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi;
4. Pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;
5. Pengelolaan dokumentasi data dan bidang perumahan dan permukiman;
6. Pelaksanaan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan; dan
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Jumlah pegawai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur sebanyak 168 orang PNS dan 46 orang PTT, total Pegawai 211 orang dengan rincian sesuai Tabel 1.1., 1.2., 1.3. dan 1.4. sebagai berikut:

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Pendidikan

KUALIFIKASI PENDIDIKAN								JUMLAH
SD	SLTP	SLTA	D1/D2	D3	D4/S1	S2	S3	
0	0	25	1	3	85	52	2	168

Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kerja Menurut Kualifikasi Pendidikan

KUALIFIKASI PENDIDIKAN								JUMLAH
SD	SLTP	SLTA	D1/D2	D3	D4/S1	S2	S3	
0	0	24	1	4	17	0	0	46

Tabel 1.3. Jumlah Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan

PANGKAT GOLONGAN				JUMLAH
GOLONGAN I	GOLONGAN II	GOLONGAN III	GOLONGAN IV	
0	27	116	25	168

Tabel 1.4. Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

JABATAN STRUKTURAL	JABATAN FUNGSIONAL	JUMLAH
17	34	51

I.C. ISU STRATEGIS

Isu strategis dapat dijadikan acuan bagi pemerintah dalam menentukan langkah-langkah penyelesaian pembangunan yang berpihak kepada masyarakat, sehingga pembangunan yang dilaksanakan tepat sasaran. Isu startegis yang tertuang pada dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 di antaranya:

a. Isu Strategis Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni dan terjangkau.
2. Menurunnya kualitas bangunan rumah dan lingkungan permukiman sehingga tumbuh kawasan kumuh di perkotaan.
3. Mitigasi bencana dan penanganan pasca bencana dan relokasi permukiman akibat bencana.

b. Isu Strategis Bidang Keciaptakaryaan dan Penataan Ruang.

1. Belum optimalnya pelayanan air minum dan sanitasi khususnya di kawasan strategis Provinsi, kawasan kumuh dan rawan air.
2. Masih terdapat daerah-daerah yang terdampak kekeringan terutama di musim kemarau. Hal ini menjadi tugas penting bagi pemerintah untuk dapat mengentaskan persoalan penyediaan air bersih dimasyarakat. Berkerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya melakukan pengentasan permasalahan air minum.
3. Belum Optimalnya pelayanan air minum dan sanitasi secara regional
4. Penurunan kapasitas air baku serta pemanfaatan air baku untuk berbagai kepentingan
5. Kecepatan pembangunan sarana prasarana air minum dan sanitasi belum dapat mengimbangi pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi.
6. Kebutuhan pokok minimal manusia akan air bersih adalah 60 liter/orang/hari. Hal tersebut harus didukung oleh peran Kabupaten/Kota dengan memiliki SPAM

perpipaan dan bukan jaringan perpipaan yang terlindungi (sesuai dengan standar teknis yang berlaku) dengan penyelenggara baik BUMN, BUMD, swasta, koperasi, maupun kelompok masyarakat. Dengan dasar kebutuhan pokok air bersih minimal 60 liter/orang/hari, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur berharap dapat meningkatkan cakupan pelayanannya dengan menerapkan program dan kegiatan yang tepat sasaran. Dengan asumsi tersebut, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya pada tahun 2022 menargetkan untuk dapat melayani kurang lebih 5.780 KK baru yang terlayani akses air minum layak, yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Timur, dengan asumsi sumber air minum mempunyai debit air minimal 0.2 lt/det di setiap lokasi rawan air.

7. Perluasan pemangku kepentingan dalam pembangunan dan pengelolaan sarana prasarana air minum sanitasi
8. Optimalisasi pemanfaatan air minum regional dalam rangka pencapaian target SPM untuk sektor Air Minum dan Sanitasi.
9. Belum ditetapkannya Revisi Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Tahun 2011-2031.
10. Belum optimalnya perwujudan upaya pemanfaatan ruang yang sesuai proyeksi spasial pengembangan wilayah karena dinamika kebijakan pembangunan sektoral yang politis.
11. Kurangnya kapasitas pemahaman SDM di lingkup TKPRD Provinsi Jawa Timur terkait pentingnya integrasi data spasial dalam rencana pembangunan sektoral di Jawa Timur.
12. Belum sinkronnya kebijakan sektoral dengan arahan pengembangan berdasarkan tata ruang.
13. Sulitnya memproyeksikan kebutuhan pengembangan dan potensi kawasan industri yang menyesuaikan dengan kebutuhan swasta.
14. Terdapat ketidaksinkronan antara kebijakan-kebijakan yang dijadikan rujukan perencanaan tata ruang (misalnya: penetapan proyek Strategis Nasional) yang berpotensi pada dinamika peruntukan ruang di daerah.
15. Perlunya sinkronisasi dokumen spasial pada kawasan daratan dengan kawasan pesisir dan pulau – pulau kecil sesuai amanat Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020

16. Perlunya penajaman dan pemetaan kawasan potensi pertambangan dalam kajian teknis yang berbasis spasial.
17. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dan minimnya pemahaman masyarakat dalam penataan ruang, serta belum optimalnya peran Sistem Informasi Tata Ruang berbasis *website online* sebagai basis data yang aktual dan sebagai bentuk untuk memberikan sosialisasi rencana tata ruang.
18. Belum optimalnya integrasi analisis lingkungan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai justifikasi teknis dan pertimbangan rencana pembangunan infrastruktur wilayah dan rencana pola ruang.
19. Belum optimalnya peran sistem informasi tata ruang berbasis website online sebagai basis data yang aktual dan sebagai bentuk untuk memberikan sosialisasi rencana tata ruang.
20. Adanya kendala dalam penyepakatan lokasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) di Kabupaten/Kota agar sesuai dengan arahan kebijakan alokasi rencana KP2B yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat (SE Mendagri dan Data Luas Baku Sawah dari Kementerian ATR/BPN masih belum sesuai dengan kondisi di lapangan).
21. Belum ditetapkannya peraturan teknis yang mengatur mekanisme insentif disinsentif penataan ruang dan insentif penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagai upaya peningkatan kualitas pembangunan yang sesuai Rencana Tata Ruang dan berkelanjutan.
22. Adanya penyesuaian ketentuan perizinan menjadi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat yang berdampak pada sulitnya pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di daerah.

c. Isu Strategis Bidang Pertanahan.

1. Reforma Agraria (*Land Reform*) di hamparan tanah lintas Kabupaten/Kota belum tertangani dengan optimal.
2. Belum jelasnya kewenangan urusan pertanahan antara instansi perpanjangan Kementerian ATR/BPN di Jawa Timur dengan Pemerintah Daerah.

d. Isu percepatan penerapan SPM bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Jenis Pelayanan Dasar diatur dengan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Pelayanan Minimal serta secara teknis diatur dalam Permen PUPR Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standart Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada SPM Pekerjaan Umum Daerah provinsi terdiri atas:

1. Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota,
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic regional lintas kabupaten/kota.

Sedangkan SPM Perumahan Rakyat daerah provinsi terdiri atas:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi.
Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana alam ditentukan setelah terjadinya bencana dan ditargetkan sesuai dengan rencana aksi akan paling lama diselesaikan dalam kurun waktu 3 tahun anggaran dengan dua tahap pelaksanaan yaitu persiapan (Pembentukan Satuan tugas penanganan rumah korban bencana, Penetapan fasilitator dan pendamping masyarakat, Pembentukan kelompok masyarakat, Terdatanya kebutuhan rumah yang rumah layak huni bagi korban bencana, Tersusunnya rencana aksi penyediaan rumah bagi korban bencana) dan pelaksanaan pembangunan rumah layak huni bagi korban bencana.
2. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Daerah provinsi.
Tingkat keberhasilan Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Daerah provinsi ditentukan dari persentase (%) jumlah rumah yang telah tersedia/terbangun dan dimanfaatkan terhadap rumah keseluruhan yang seharusnya disediakan dalam rangka memfasilitasi masyarakat yang terkena program pemerintah.

Dasar Penyediaan Rumah Layak Huni bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Memberikan prioritas dan menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk dapat memberikan bantuan kepada msyarakat yang lebih menderita dan lebih memerlukan,

2. Kesepakatan masyarakat dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan, kearifan lokal dan kegotong royongan menjadi dasar untuk melakukan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana dan terkena relokasi program pemerintah.
3. Memberikan stimulan agar masyarakat bergotong royong menyediakan rumah layak huni dan ramah bencana serta mengutamakan kepada masyarakat yang terkena bencana dan dan tidak mampu dari segi pembiayaan.
4. Keswadayaan masyarakat yaitu dalam pelaksanaan perbaikan/rehabilitasi rumah dapat dikerjakan sendiri atau secara gotong-royong, dan sekiranya dikerjakan dengan memanfaatkan tenaga sendiri, dan bila pengerjaan tidak dapat dikerjakan sendiri atau dengan gotong royong maka dapat menggunakan tukang yang profesional atas beban biaya sendiri.
5. Memberi pengenalan dan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan pembangunan/penyediaan rumah layak huni yang bertumpu pada masyarakat.

e. Isu Kesetaraan Gender

Bidang infrastruktur pada umumnya didominasi oleh laki-laki karena secara jumlah, teknisi laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Hal tersebut membuat peran perempuan di bidang ini, khususnya sebagai pengguna infrastruktur, kurang mendapatkan perhatian. Padahal, dengan meningkatkan kepekaan gender dalam pembangunan infrastruktur, perempuan dapat merasa nyaman sebagai pengguna infrastruktur. Di bidang transportasi misalnya, hal-hal kecil, seperti pegangan di dalam unit bus yang terlalu tinggi, membuat perempuan merasa risih. Jika infrastruktur dibangun atau diadakan dengan kepekaan terhadap isu gender, maka hal-hal seperti ini bisa dihindari. Penyediaan ruang laktasi di gedung, taman penitipan anak, lingkungan yang juga didesain ramah bagi penyandang difabel dengan dibangunnya jalur landai dan jalur kuning tuna netra di area pejalan kaki dan memiliki taman dengan bangku- bangku sebagai ruang terbuka hijau adalah beberapa hal yang mendesak dilakukan dalam rangka penerapan kesetaraan gender ini. Bahkan sampai pada hal-hal internal pemerintahan seperti penentuan pejabat. Keterlibatan perempuan juga wajib diperhitungkan dan beri kesempatan seluas-luasnya meskipun secara rasio pegawai laki-laki lebih besar dari pada pegawai perempuan.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur nomor 66 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Provinsi Jawa Timur, setiap OPD berkewajiban untuk mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam perencanaan,

pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program, dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Pelaksanaan PUG-PUPR memiliki tujuan yaitu memastikan bahwa penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang PUPR telah responsive gender, artinya tidak adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mendapatkan manfaat dari hasil-hasil pembangunan infrastruktur PUPR serta meningkatkan partisipasi dan ikut mengontrol proses pembangunan infrastruktur PUPR. Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun pemerintah untuk mengatasi berbagai kesenjangan baik antara laki-laki dan perempuan. Selain itu juga ingin mengukur seberapa besar akses yang diberikan antara laki-laki dan perempuan serta kelompok-kelompok masyarakat seperti kelompok disabilitas, kelompok lansia dan kelompok-kelompok lainnya.

Atas upaya dan komitmen terhadap Gender, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) di tahun 2017 yakni penghargaan pemerintah yang diberikan pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang berhasil melaksanakan pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Di dalam Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur sendiri telah memiliki Tim Pengarusutamaan Gender. Tim ini (Tim Focal Point Gender) terdiri dari beberapa staf di dalam Dinas yang tugasnya:

1. Mempromosikan Pengarusutamaan Gender pada unit kerja.
2. Memfasilitasi penyusunan rencana kerja yang berperspektif Gender.
3. Mempersiapkan pembiayaan dalam rangka pelaksanaan survey lapangan, monitoring dan evaluasi serta pelaksanaan sosialisasi berkaitan dengan kegiatan
4. Melaksanakan pendokumentasian terhadap seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim.
5. Mendorong pelaksanaan analisis Gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja.
6. Melaporkan seluruh kegiatan kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tembusan Ketua Kelompok kerja.

Sedangkan fungsi Focal Point gender adalah :

1. Sebagai salah satu sumber informasi tentang konsep Gender, PUG, Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG) dan Program Pemberdayaan Perempuan
2. Sebagai penggerak (perintis) terbentuknya jejaring PUG di lingkungan kerjanya
3. Sebagai pelaksana dari setiap kegiatan pembangunan yang responsive gender.

Kaitan gender dengan permukiman, akses informasi perempuan terbatas mengenai pengelolaan hunian, sampah, limbah, mekanisme bantuan rumah layak huni, dsb. Anak-anak di permukiman padat/kumuh sulit mendapatkan akses ruang bermain. Selain itu partisipasi perempuan, lansia, dan difabel dalam perencanaan permukiman masih rendah.

Banyaknya kasus kekerasan yang terjadi di permukiman kumuh dan terjadi pada wanita dan anak-anak sebagai korban kekerasan menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan hasil yang disebabkan oleh faktor internal seperti:

1. Belum adanya panduan penyelenggaraan infrastruktur yang mempertimbangkan isu-isu gender di dalamnya
2. Belum diintegrasikannya isu kekerasan di lingkungan permukiman dalam perencanaan pembangunan infrastruktur
3. Penggunaan data terpilah dalam perencanaan permukiman belum optimal
4. Data-data kekerasan belum menjadi pertimbangan dalam penyelenggaraan permukiman
5. Analisis gender belum sepenuhnya terinternalisasi dalam tahap-tahap penyelenggaraan permukiman
6. Belum efektifnya sinergi antar berbagai sector pembangunan dalam penanganan permukiman kumuh.

f. Isu Percepatan Pembangunan Provinsi Jawa Timur Melalui Perpres 80 Tahun 2019.

Pada akhir tahun 2019 Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden melalui PERPRES Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan. Perpres ini bertujuan untuk meningkatkan secara maksimal laju pembangunan di Provinsi Jawa Timur dengan menyediakan banyak program-program kegiatan yang bisa di laksanakan. Pendanaan yang tertuang di dalam

program-program tersebut, berasal dari empat sumber yaitu, APBN, APBD, KPBU serta sumber pendanaan lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Dengan adanya Perpres ini diharapkan iklim investasi dapat meningkat secara signifikan dan semua kegiatan masyarakat dapat terpadu dengan saling terkoneksi antar sektor baik infrastruktur, ekonomi, sosial dan budaya. Secara umum, gambaran pembangunan yang diharapkan terjadi adalah untuk kawasan GERBANGKERTOSUSILA akan difokuskan pada konektivitas. Sehingga, ketersediaan transportasi publik akan tersedia dengan baik. Sedangkan untuk pengembangan di kawasan BTS, akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur yang lebih memadai bagi para wisatawan. Baik dari arah Malang, Pasuruan maupun Probolinggo. Dalam Perpres 80 tahun 2019, terdapat banyak kegiatan yang berhubungan dengan Pekerjaan Umum Keciaptakaryaan - Penataan Ruang serta Perumahan, kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas untuk segera dilaksanakan sesuai dengan Perpres 80 Tahun 2019 itu antara lain :

1. Pembangunan sistem jaringan distribusi utama SPAM Regional Umbulan di Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo, dan Kab. Gresik.
2. Pengembangan SPAM Regional Pantura Kab. Tuban, Kab. Bojonegoro, Kab. Lamongan (Sumber air baku dari Sungai Bengawan Solo)
3. Pembangunan SPAM Karangbinangun, Kabupaten Lamongan
4. Pembangunan SPAM Brondong, Kabupaten Lamongan
5. Pembangunan Indonesia Islamic Science Park (IISP) di Kabupaten Bangkalan
6. Pembangunan sistem jaringan distribusi utama SPAM Regional Mojolagres di Kab. Lamongan

g. Isu Pemulihan Pandemi Covid-19

Pada awal tahun 2020 terdapat penyebaran pandemi Corona virus-2019 (covid-19) yang dialami oleh seluruh negara termasuk Indonesia. Dampak yang dialami cukup besar dengan terputusnya mata-rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri dan pariwisata yang berdampak pada meningkatnya angka-angka pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Keadaan ini tentu harus dikendalikan, maka menjadi keharusan bagi Pemerintah untuk melakukan orientasi baru dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2021 dengan memfokuskan pada pemulihan kehidupan masyarakat dan perekonomian, sehingga sektor-sektor ekonomi dan sosial masyarakat dapat kembali meningkat dan berkembang. Sektor-sektor yang menjadi

titik utama peningkatan dan pengembangan yaitu sektor industri, pariwisata dan investasi, sehingga tema RKP tahun 2021 adalah "Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial".

Terkait dengan pemulihan kembali sektor-sektor terdampak covid-19, pada tahun 2020 telah dilaksanakan kegiatan penyusunan DED Pengembangan BTS, sehingga di tahun 2021 ini, kawasan BTS (Bromo-Tengger-Semeru) ditetapkan sebagai salah satu dari 5 (lima) Kawasan Super Prioritas Pengembangan Pariwisata Nasional Provinsi Jawa Timur. Hal ini menjadi sangat penting karena untuk mendukung pemulihan akibat pandemic Covid-19, perlu adanya dukungan pengembangan permukiman salah satunya melalui pembangunan Prasarana Sarana Utilitas Umum yang bersinergi dengan pengembangan Kawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat pada lokasi Bromo-Tengger-Semeru tersebut. Ini lah salah satu upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemic covid 19 melalui pengembangan sector pariwisata. Selain itu, di masa pandemi ini, Dinas juga tetap akan menjaga kinerjanya di bidang air minum, sanitasi dan juga perumahan agar tetap selalu memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat di wilayah Provinsi Jawa Timur. Salah satunya dengan tetap melaksanakan pembangunan-pembangunan pada sector utama bidang pekerjaan umum dan perumahan.

h. Isu Strategis Penerapan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 (Undang-Undang Cipta Kerja)

Pada Tahun 2020 Pemerintah Republik Indonesia telah mengundang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, atau yang lebih dikenal dengan UU Cipta Kerja, yang dibentuk dengan tujuan untuk:

1. Menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMKM serta industry dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya, dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antar daerah dalam kesatuan ekonomi nasional.
2. Menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja
3. Penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMKM serta industry nasional

4. Penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan system peningkatan ekosistem investasi, kemudahan, dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada Pancasila.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Undang-Undang Cipta Kerja mengatur mengenai kebijakan strategis yang meliputi:

- Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha
- Ketenagakerjaan
- Kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMKM
- Kemudahan berusaha
- Dukungan riset dan inovasi
- Pengadaan tanah
- Kawasan ekonomi
- Investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional
- Pelaksanaan administrasi pemerintahan
- Pengenaan sanksi

Dengan diundangkannya Undang-Undang ini maka terjadi perubahan dalam penyelenggaraan penataan ruang yang merupakan salah satu bidang urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur. Adapun kebijakan penataan ruang dalam kerangka Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah isu resentralisasi kewenangan penyelenggaraan penataan ruang yang mempunyai implikasi terhadap proses dan prosedur penataan ruang di daerah, yaitu :

- Perijinan berbasis RDTR secara online Single Sistem (OSS) serta penyesuaian pengaturan perizinan di daerah menjadi persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Pusat.
- Penyederhanaan produk Rencana Tata Ruang yang terintegrasi dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah
- Percepatan penetapan RTRW dan RDTR

Terdapat beberapa perubahan antara ketentuan dalam UU Cipta Kerja dengan peraturan perundangan tentang penataan ruang yang sebelumnya, antara lain terkait Penyederhanaan Perizinan Berusaha, Pengadaan Tanah, Kawasan Ekonomi dan Investasi, dan Proyek Strategis Nasional. Beberapa Poin substansial perubahan tersebut meliputi :

1. Penyesuaian nomenklatur perizinan pemanfaatan ruang menjadi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang diterbitkan oleh pemerintah pusat;
2. Penambahan penanganan ketidaksesuaian pola ruang dengan kawasan hutan dan hak atas tanah;
3. Penambahan klausul bantek dan bintek;
4. Penghapusan klausul dekonsentrasi atau tugas pembantuan untuk KSN;
5. Penghapusan klausul penyebarluasan informasi APZ Nasional;
6. Penyesuaian dokumen Rencana Rinci Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dan Kawasan Strategis Kabupaten/Kota (KSK/K) yang diintegrasikan dalam Perda RTRW tanpa dituangkan dalam dokumen Rencana Rinci Tata Ruang;
7. Angka minimal kawasan hutan seluas 30% sebagai syarat pelestarian lingkungan dihapus, diganti sesuai kondisi kawasan (DAS, biogeofisik, iklim, penduduk, social ekonomi);
8. Proses perencanaan RDTR tanpa porses legislasi (ditetapkan melalui Perkada);
9. Adanya tenggat waktu penetapan RTR pasca Persub;
10. Penyesuaian mekanisme pemberian rekomendasi Gubernur terhadap Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota;
11. Kebijakan Nasional yang bersifat strategis tetapi belum termuat di RTR dapat dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi kesesuaian kegiatan dari Pusat;
12. Persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang diterbitkan oleh Pusat;
13. Agropolitan dan kawasan perdesaan dihapus/tidak lagi diatur dalam taraf UU;
14. Syarat penetapan sebuah pelanggaran pemanfaatan ruang adalah harus mengakibatkan perubahan fungsi ruang;
15. Pembatasan akses kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum tidak lagi diberi sanksi pidana.

I.D. CASCADING KINERJA (KETERHUBUNGAN DENGAN RPJMD)

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih merupakan Visi Pembangunan Daerah Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai Misi yang diemban. Visi pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur untuk periode RPJMD 2019 - 2024 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih, adalah sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT JAWA TIMUR YANG ADIL, SEJAHTERA, UNGGUL DAN BERAKHLAK DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PARTISIPATORIS INKLUSIF MELALUI KERJA BERSAMA DAN SEMANGAT GOTONG ROYONG”

Misi dari kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yaitu sebagai berikut:

- a. Mewujudkan keseimbangan pembangunan ekonomi, baik antar kelompok, antar sektor dan keterhubungan wilayah.
- b. Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar terutama kesehatan dan pendidikan, penyediaan lapangan kerja dengan memperhatikan kelompok rentan.
- c. Tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, terbuka, parsipatoris memperkuat demokrasi kewarganegaraan untuk menghadirkan ruang sosial yang menghargai prinsip kebinekaan.
- d. Melaksanakan pembangunan berdasarkan semangat gotong royong, berwawasan lingkungan untuk menjamin keselarasan ruang ekologi, ruang sosial, ruang ekonomi dan ruang budaya.

Berdasarkan penjabaran rumusan visi dan misi diatas yang sesuai dengan peran, tugas dan fungsi serta dengan mempertimbangkan pencapaian pembangunan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya yang akan dihadapi lima tahun kedepan yaitu misi pertama Mewujudkan keseimbangan pembangunan ekonomi, baik antar kelompok, antar sektor, dan keterhubungan wilayah yang bertujuan meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang didukung Konektivitas Antar wilayah dengan sasaran meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar dan Sumber Daya Air sehingga diharapkan dapat memudahkan akses masyarakat terhadap pekerjaan dan keterhubungan antar wilayah.

Adapun program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih mendukung rumusan visi dan misi yang akan dihadapi Lima tahun ke depan yaitu :

Bhakti 1 : Jatim Sejahtera – Mengentaskan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial

Bhakti 2 : Jatim Kerja – Memperluas lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi

Bhakti 3 : Jatim Cerdas dan Sehat - pelayanan dasar berkualitas

Bhakti 4 : Jatim Akses – membangun infrastruktur menuju pengembangan wilayah terpadu dan berkeadilan

Bhakti 5 :Jatim Berkah – membangun karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur dan berintegritas

Bhakti 6 : Jatim Agro – memajukan sektor pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan berbasis kerakyatan

Bhakti 7 : Jatim Berdaya – ekonomi kerakyatan dengan basis UMKM, koperasi, BUMDesa dan mendorong pemberdayaan pemerintah Desa

Bhakti 8 : Jatim Amanah : menyelenggarakan pemerintah yang bersih, efektif dan anti korupsi

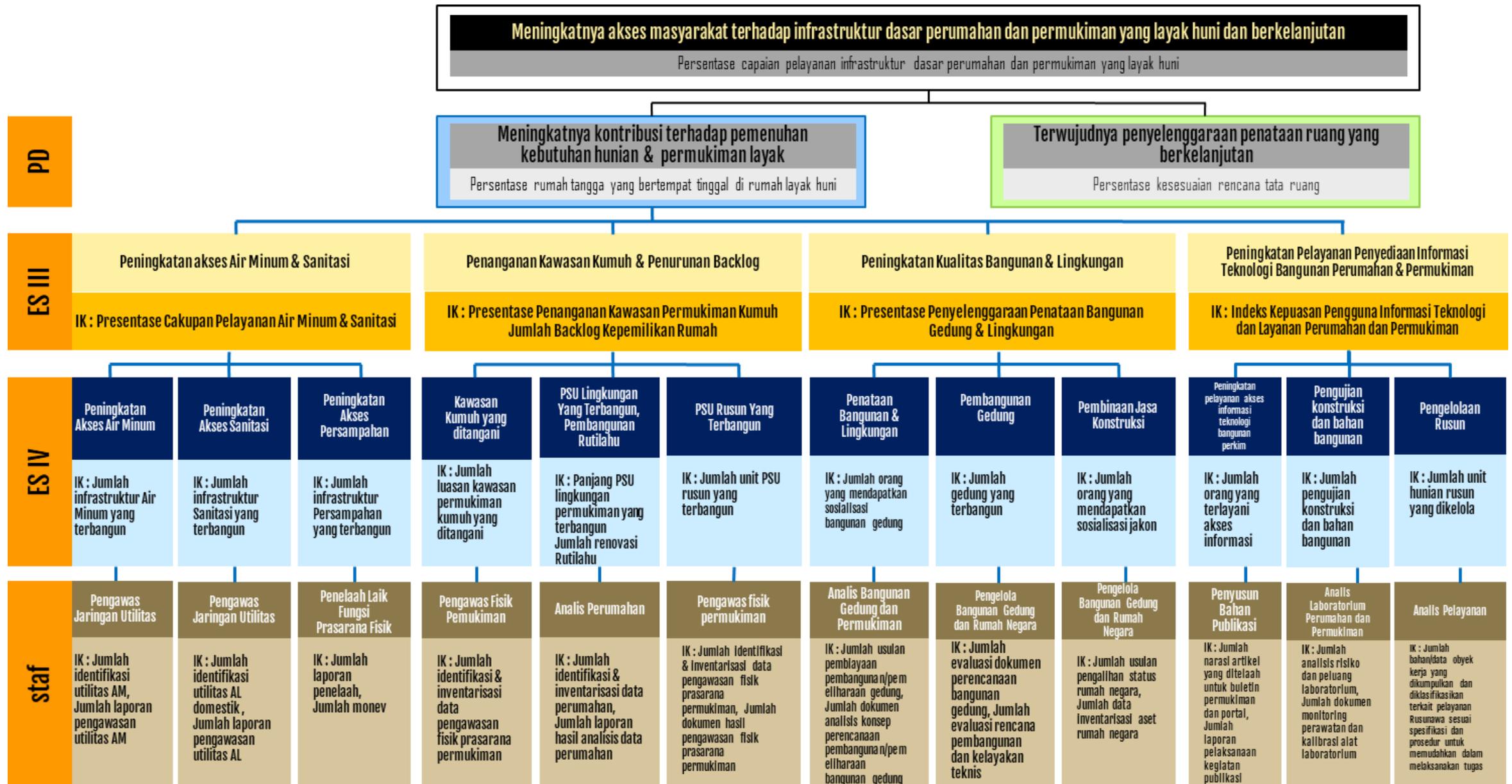
Bhakti 9 : Jatim Harmoni – menjaga harmoni social dan alam dengan melestarikan kebudayaan dan lingkungan hidup

Dari pernyataan dan janji kampanye gubernur terpilih, isu dan permasalahan bidang infrastruktur ada pada Nawa Bhakti Satya Gubernur yang ke empat yaitu JATIM AKSES. Di dalamnya didapatkan beberapa poin yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur sebagai berikut:

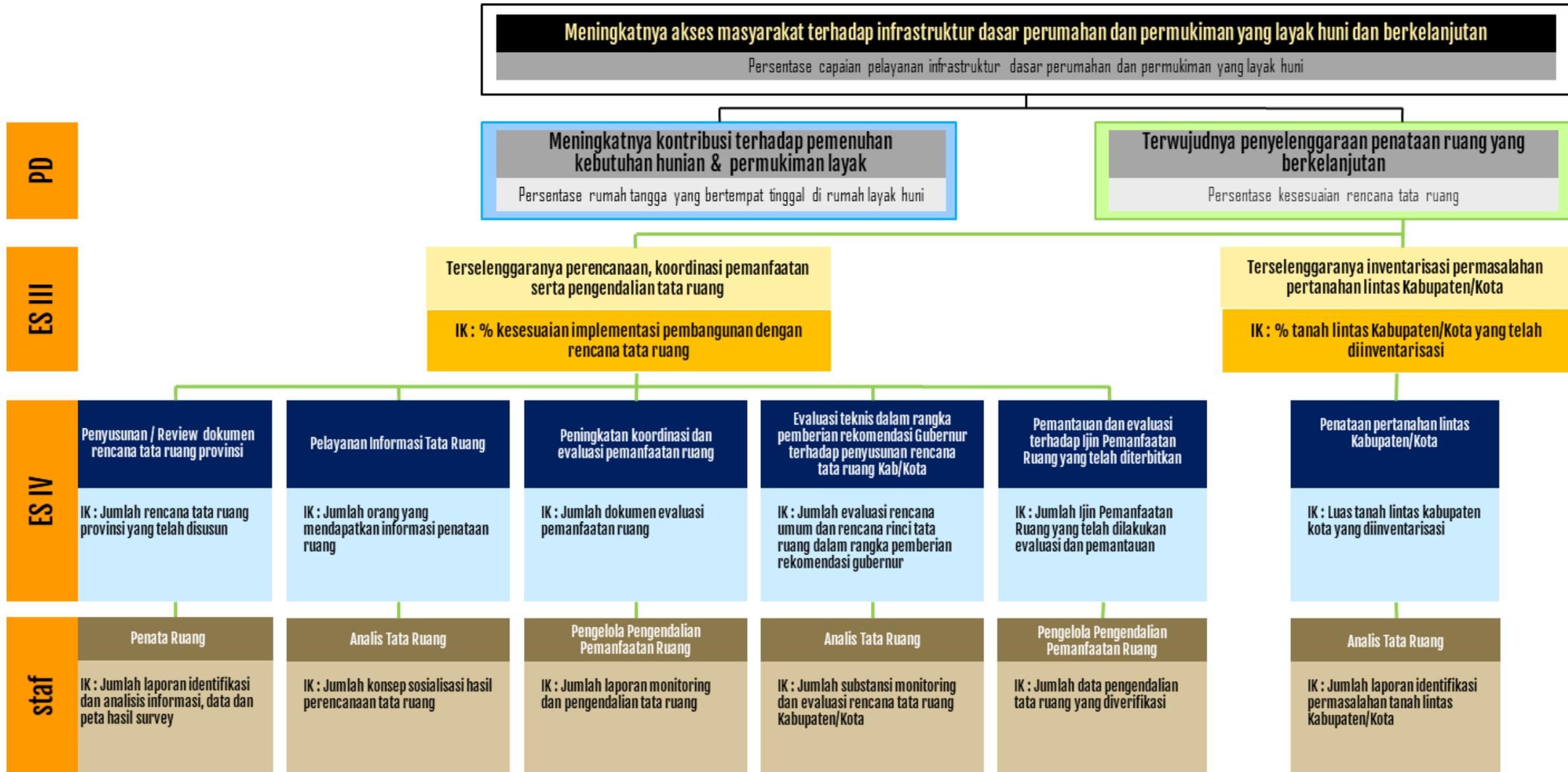
- a. Keandalan Infrastruktur Perkotaan
- b. Penataan Ruang
- c. Pelayanan Air Bersih
- d. Drainase
- e. Mitigasi risiko dan rawan bencana
- f. Kawasan Strategis Provinsi yang baru
- g. sanitasi dan persampahan

Kesesuaian program Nawa Bhakti Satya sesuai dengan peran, tugas dan fungsi serta dengan mempertimbangkan pencapaian pembangunan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya untuk perumusan Rencana Strategis 2019-2024 adalah Bhakti 4 Jatim Akses – membangun infrastruktur menuju pengembangan wilayah terpadu dan berkeadilan. Adanya tiga urusan pelayanan dasar dalam meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur yang selaras dan berkesinambungan yaitu perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan melalui program Rusun Sewa, penyediaan PSU dan renovasi Rumah Tidak Layak Huni yang difokuskan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah serta program infrastruktur dalam hal pengentasan kemiskinan yang berkeadilan sejahtera sosial dengan peningkatan akses air minum yang layak dan sanitasi yang aman, sesuai dalam gambar 1.2. Cascading kinerja, 1.3. Cascading kinerja Lanjutan, 1.4. Peta Proses Bisnis dan 1.5. Peta Proses Bisnis Lanjutan sebagaimana terlampir.

Gambar 1.2. Cascading Kinerja



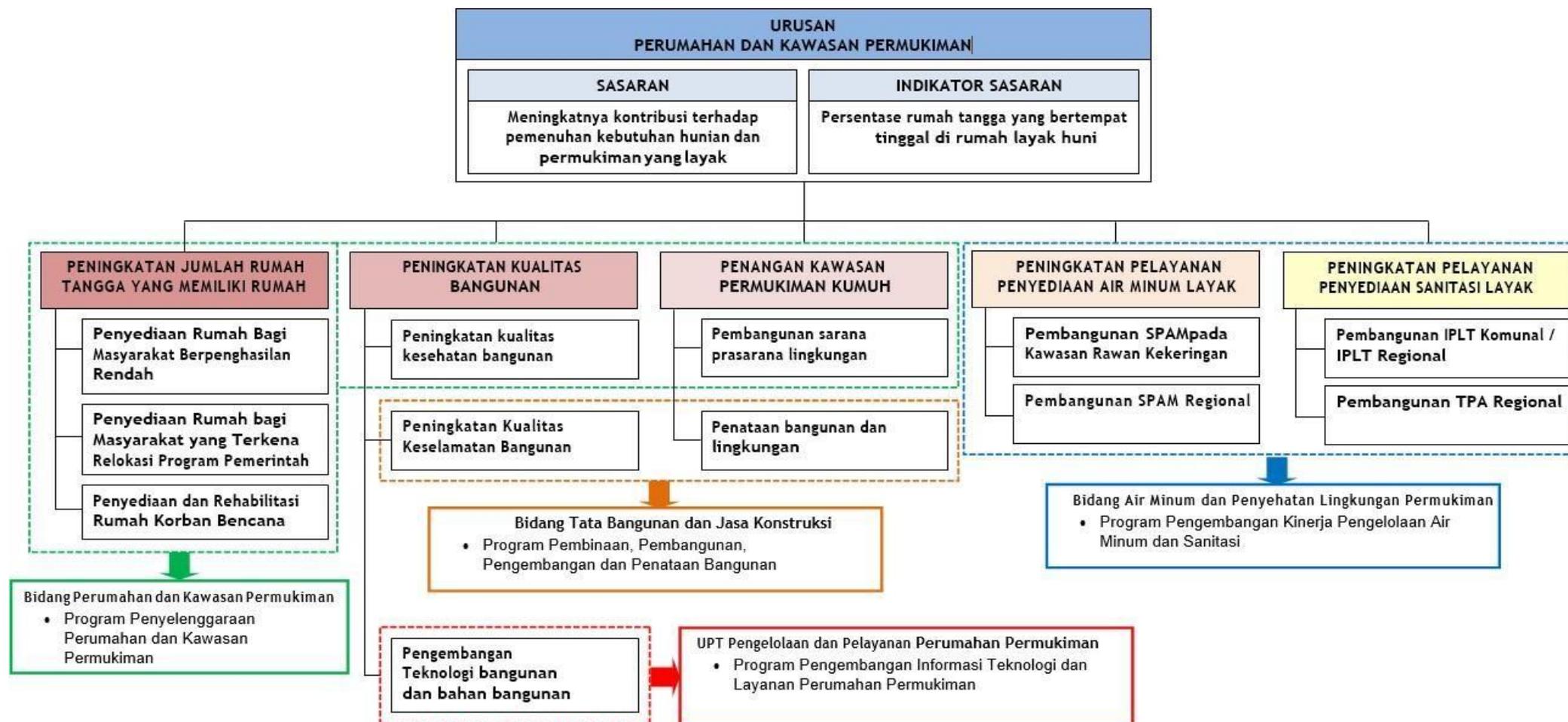
Gambar 1.3. Cascading Kinerja (lanjutan)



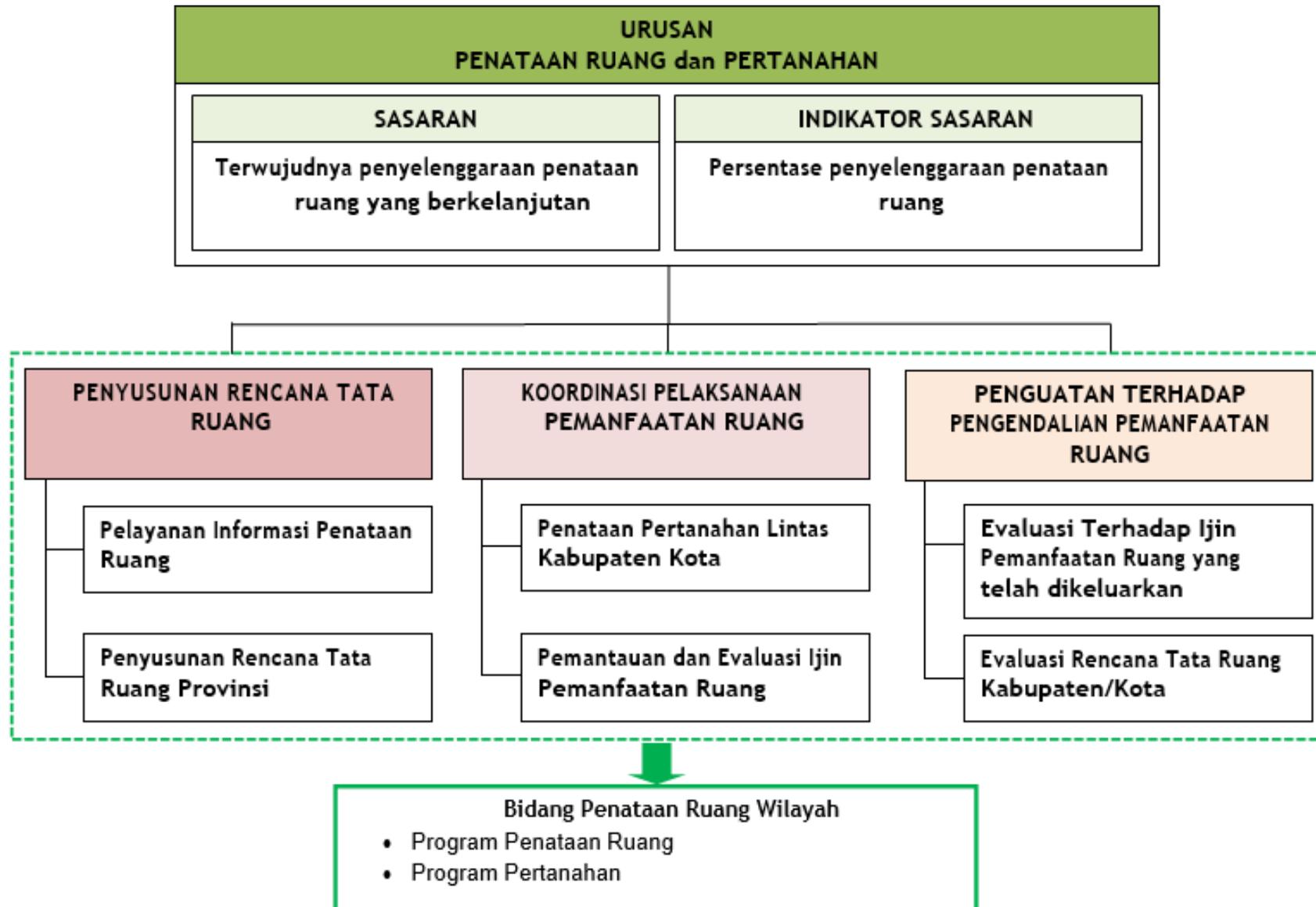
I.E. PETA PROSES BISNIS

Peta Proses Bisnis Pencapaian Sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2024 adalah terlampir pada gambar 1.4.

Gambar 1.4. Peta Proses Bisnis



Gambar 1.5. Peta Proses Bisnis (lanjutan)



I.F. RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se Jawa Timur, telah dilakukan Evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur oleh Tim Evaluasi yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/274/KPTS/013/2022 tentang Tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil evaluasi implementasi SAKIP menunjukkan bahwa Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur memperoleh nilai 85,11 atau predikat A. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya sudah cukup memadai, serta kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur menunjukkan hasil yang memuaskan.

Selain memperhatikan kualitas penerapan akuntabilitas, evaluasi juga menilai dan melihat kondisi terakhir, praktik dan hal-hal substantif yang telah diwujudkan dan dilakukan serta konsistensi dan keberlanjutan implementasinya. Uraian selengkapnya secara singkat atas hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Secara umum Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur berhasil meningkatkan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pelaksanaan dan manajemen kinerja;
2. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur telah menunjukkan upaya perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan;

3. Penyusunan dokumen perencanaan telah dijabarkan ke berbagai sasaran dan indikator kinerja keseluruhan ASN di semua level. Hal yang perlu dilengkapi dengan definisi operasional atas setiap indikator yang digunakan;
4. Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur belum memenuhi kriteria penyajian informasi kinerja yang baik, yaitu perlu adanya pemilahan sesuai dengan tugas dan fungsi pada penyajian kendala.

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka meningkatkan manajemen kinerja Dalam rangka meningkatkan manajemen kinerja, dapat direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sebagai upaya peningkatan manajemen kinerja agar disertai pula dengan pengembangan SDM yang menangani akuntabilitas kinerja baik secara kualitas maupun kuantitas;
2. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dengan menyusun definisi operasional atas setiap indikator yang digunakan serta menetapkan target yang *attainable* agar memenuhi indikator SMART;
3. Pemimpin Perangkat Daerah agar memastikan pada setiap jenjang jabatan selalu dilakukan *monitoring* capaian kinerja sebagaimana yang disepakati di tiap tingkatan berbasis Teknologi Informasi serta sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*;
4. Meningkatkan kualitas laporan kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur dengan menyajikan informasi kinerja yang baik sebagai upaya untuk meminimalisasi kendala yang ditimbulkan dalam informasi kendala;
5. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahunan sebelumnya sehingga dapat mencapai kondisi yang diinginkan sebagaimana dimaksudkan dalam rekomendasi sebagai umpan balik perbaikan perencanaan kinerja, penerapan manajemen kinerja dan peningkatan capaian kinerja;
6. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas penerapan akuntabilitas kinerja berkelanjutan yang telah dibangun di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur.

PERENCANAAN KINERJA

II.A. RENCANA STRATEGIS 2019-2024

Program Prioritas Pembangunan dalam RPJMD merupakan manifestasi dari Nawa Bhakti Satya yang merupakan visi politik kepala daerah terpilih sebagai komitmen kepada rakyat Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya menjadi visi pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 2019-2024, yaitu “Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul, dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong”

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur sesuai dengan tugas dan fungsinya mendukung program prioritas pembangunan Jawa Timur pada Bhakti – 4 : Jatim Akses, yang akan menjawab tantangan pengembangan wilayah di Jawa Timur. Ketimpangan akses menyebabkan Jawa Timur belum dapat mengoptimalkan potensinya. Sebagai ilustrasi, potensi pariwisata dan industri berbasis agro dan maritim di pesisir selatan terkendala jaringan listrik dan energi yang minim, serta tiadanya akses pelabuhan barang dan bandara di wilayah Mataraman (eks karesidenan Madiun dan Kediri). Di Madura, pengembangan Jembatan Suramadu belum diikuti pembangunan jalur terusan menuju pesisir utara Pulau Madura yang berkapasitas tinggi, serta belum terbangun pelabuhan samudera sebagai pengungkit pertumbuhan di koridor utara Pulau Madura. Konektivitas di pesisir selatan Tapal Kuda juga belum terwujud sehingga mendorong potensi kesenjangan dengan pesisir utara.

Kawasan kepulauan seperti Bawean dan kepulauan di Kabupaten Sumenep juga masih memiliki banyak tantangan dalam keandalan transportasi laut. Disisi lain, kawasan metropolitan seperti Gerbang Kertausila dan Malang Raya juga semakin terkendala masalah kemacetan dan kehandalan infrastruktur perkotaan, yang berpotensi menghambat pertumbuhan dan daya saing dari motor penggerak ekonomi wilayah. Penanganan atas masalah-masalah seperti inilah yang menjadi fokus dari Bhakti Jatim Akses. Solusi Bhakti Jatim Akses, dipastikan terdapatnya landasan pemahaman teknis yang memadai. Sebagai contoh, dalam merancang jalur logistik pesisir selatan, turut dipertimbangkan kontur

pegunungan di selatan Jawa yang mempengaruhi penataan ruang serta daya saing intermoda dari transportasi darat, sehingga turut dikembangkan *short sea shipping* atau pelayaran jarak pendek lintas pelabuhan selatan seperti dari Cilacap-Pacitan-Prigi-Banyuwangi-Bali sebagai perintis jalur perdagangan selatan Jawa.

Pada pengembangan kawasan, diperhatikan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) untuk memastikan kesinambungan sumber daya air. Inilah sebabnya maka didorong pengembangan berbasis kawasan pegunungan, yaitu di antaranya Kawasan Selingkar Gunung Wilis, Kelud – Kawi - Arjuno, Selingkar Bromo, Argopuro dan Selingkar Ijen. Potensi bencana dan mitigasi risiko juga menjadi perhatian, karena masih ditemukan permasalahan seperti sungai yang justru menyempit dari hulu ke hilir, manajemen air yang tumpang tindih antara drainase dan pengairan pertanian, dan pengembangan kawasan di lokasi yang rawan longsor tanpa mitigasi yang memadai. Bhakti Jatim Akses fokus kepada Sapto Karso (tujuh koridor) yaitu : 1) Koridor Maritim dan Logistik di Tuban – Gresik - Bangkalan - Sumenep (Jalur Utara); 2) Koridor Industri Agro di Tuban – Madiun – Magetan - Pacitan (Jalur Utara - Selatan sisi Barat); 3) Koridor Pariwisata dan Maritim Perikanan di Pacitan – Prigi - Sendangbiru – Jember - Banyuwangi (Jalur Selatan); 4) Koridor Pengembangan Kota Menengah di Madiun – Nganjuk – Kediri – Jombang – Pasuruan - Situbondo (Jalur Tengah dan Utara Tapal Kuda); 5) Koridor Megapolitan di Surabaya - Malang; 6) Koridor Logistik Maritim dan Pariwisata di Banyuwangi – Situbondo - Sumenep (Jalur Utara-Selatan sisi Timur); dan 7) Koridor Pengembangan Kota Menengah Kompak (*Smart and Compact*) di Magetan – Trenggalek – Tulungagung - Malang (Dampit) – Lumajang – Jember - Banyuwangi (Kalibaru) (Jalur Tengah). Pengembangan koridor ini memperhatikan keadilan akses seperti dermaga perintis di daerah kepulauan Kabupaten Sumenep dan armada laut yang handal untuk Bawean, kesinambungan akses kawasan pedesaan dan perkotaan, serta memastikan keterpaduan lintas sektor yaitu transportasi darat-rel-laut-udara, energi dan listrik, telekomunikasi, sanitasi dan persampahan. Strategi pembiayaan melibatkan optimalisasi pembiayaan APBD, pembiayaan inovatif (kontrak berbasis kinerja dan kerjasama pemerintah-badan usaha atau KPBU), serta sinergi lintas hirarki (pusat-provinsi-kabupaten-des) dan peran serta masyarakat di tingkat lingkungan.

Untuk mendukung Bhakti-4 tersebut, diperlukan upaya dalam bentuk strategi dan arah kebijakan pembangunan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan pencapaian tujuan dan sasaran

masing-masing misi dilaksanakan berpedoman pada strategi yang menjadi landasan utama pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.

II.B. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Gubernur yang merupakan dukungan kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur sesuai dengan urusan yang diampu serta dijabarkan secara spesifik dan terukur dalam pembangunan jangka menengah. Berdasarkan ruang lingkup serta mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024, maka tujuan pembangunan bidang perumahan, permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang secara garis besar terkait pada 4 program prioritas pembangunan, yaitu:

1. Meningkatkan penyediaan rumah bagi KK Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR),
2. Penanganan permukiman kumuh perkotaan,
3. Memenuhi hak dasar masyarakat atas Air Minum dan sanitasi yang layak,
4. Meningkatkan kualitas perencanaan Tata Ruang yang dilandasi dengan legalitas hukum sehingga dapat digunakan sebagai acuan pemanfaatan dan pengendalian ruang.

a. TUJUAN

Tujuan yang hendak dicapai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya sesuai dengan penjabaran Visi Misi Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur adalah:

1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan, dengan indikator tujuan:
 - Persentase capaian pelayanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak huni.
 - Persentase Kasus Sengketa Yang Termediasi.

b. SASARAN

Sasaran pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan adalah :

1. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak, dengan indikator sasaran
 - Persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni

2. Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan, dengan indikator sasaran:
 - Persentase kesesuaian rencana tata ruang
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, dengan indikator sasaran:
 - Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah

Tabel 2.1. Matriks Hubungan antara Tujuan dan Sasaran

TUJUAN		SASARAN	
TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR
1	2	3	4
Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan	1. Persentase capaian pelayanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak huni	Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak	Persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni
	2. Persentase Kasus Sengketa Yang Termediasi	Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan	Persentase kesesuaian rencana tata ruang
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah

II.C. ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan adalah arah yang diambil dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan, maupun bersifat eksternal, yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

1. Peningkatan kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak.
 - a. Penataan Bangunan Gedung :
 1. Pembangunan gedung
 2. Penataan bangunan gedung dan lingkungannya
 3. Pembinaan jasa konstruksi

b. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Peningkatan pemenuhan perumahan yang layak huni bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, Peningkatan pembangunan PSU di kawasan permukiman kumuh, pendampingan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), yang secara garis besar dilaksanakan dengan kebijakan :

1. Penataan dan peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas 10 Ha sampai dengan di bawah 15 Ha.
2. Pendataan Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban Bencana atau relokasi Program Provinsi.
3. Penyelenggaraan PSU Permukiman.
4. Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi.

c. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi

Pembangunan sarana prasarana penyediaan air minum dan sanitasi di wilayah-wilayah tertentu (Kawasan Strategis Provinsi, kawasan kumuh dan rawan air), Melaksanakan fasilitasi penyediaan air minum dan sanitasi Regional, Penyusunan Pedoman pengelolaan Air Minum dan Sanitasi, Memberikan bantuan teknis kepada Penyelenggara Air Minum dan Sanitasi, Pembinaan penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi, Meningkatkan Komunikasi antara Tim/Pokja/forum yang berkaitan dengan air minum dan sanitasi dalam penyediaan informasi yang terintegrasi, yang secara garis besar dilaksanakan dengan kebijakan :

1. Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum.
2. Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional.
3. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah.
4. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase.

d. Pengembangan Informasi Teknologi dan Layanan Perumahan Permukiman

Peningkatan penyebaran informasi teknologi dan pengembangan laboratorium perumahan dan permukiman yang berkualitas dan berkelanjutan, Pendidikan dan pelatihan kemasyarakatan produktif melalui pembinaan pelaku pembangunan perumahan dan permukiman dalam menghadapi era pasar bebas, yang secara garis besar dilaksanakan dengan kebijakan:

1. Peningkatan pelayanan akses Informasi teknologi bangunan permukiman.
2. Pengujian konstruksi dan bahan bangunan.
3. Pengelolaan RUSUN

2. Penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan

a. Penataan Ruang

Pengembangan dan pemantapan keterkaitan antara wilayah yang berfungsi kantong- kantong produksi sektor primer dengan sentra pengolahan serta sentra pemasaran dalam pengembangan sistem agropolitan; Pengembangan sistem perkotaan untuk menunjang pencapaian tujuan pengembangan wilayah Jawa Timur; Pemantapan penyediaan prasarana wilayah dengan meningkatkan ketersediaannya, skala pelayanannya, distribusi spasialnya, dan keterpaduannya guna menunjang pengembangan wilayah; Pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung untuk mencapai perlindungan lingkungan sumber daya alam/buatan dan ekosistemnya, dengan cara meminimalkan resiko lingkungan, mengurangi risiko bencana, mengurangi efek pemanasan global, dan menghargai kearifan lokal, melalui pengembangan kegiatan pariwisata, penelitian, dan edukasi. Pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan guna mendukung pemantapan sistem agropolitan dan sistem perkotaan dalam meningkatkan daya saing dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran kawasan ekonomi *high tech industrial park*, kawasan ekonomi unggulan, kawasan agropolitan, kawasan koridor metropolitan, dan kawasan kerja sama regional di Provinsi Jawa Timur, yang secara garis besar dilaksanakan dengan kebijakan Penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang

b. Pertanahan

1. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum
2. Penatagunaan tanah

II.D. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) berisikan perencanaan yang global dengan penjabaran hanya sampai kepada Program hingga perlu dioperasionalkan dengan perencanaan yang lebih mikro sampai penjabaran terakhir pada kegiatan-kegiatan namun masih dalam satu rangkuman dari seluruh perencanaan pembangunan baik untuk Kementerian/Lembaga di Pusat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Daerah, perencanaan yang lebih mikro tadi disebut dengan Rencana Kerja Perangkat (RKP) di Pusat dan RKPD di Daerah. Sehingga pada akhirnya RKP yang diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dirancang untuk Pemerintah Pusat, dan RKPD yang diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 yang dirancang untuk Pemerintah Daerah, di Jawa Timur telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2020. Penyusunan RKT berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN & RB) Nomor 29 Tahun 2010 Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun Rencana Kinerja Tahun 2022 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2. Rencana Kinerja Tahun 2022

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2022
1	2	3	4
Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan	Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak	Persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni	69,8%
	Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan	Persentase kesesuaian rencana tata ruang	88,00%
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah	87,59%

II.E. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 yang telah dibuat untuk melaksanakan kegiatan, program dan sasaran di tahun 2022 menjadi tumpuan bagi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur untuk mewujudkan kinerja Output ataupun Outcome yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang ditindaklanjuti dengan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja selanjutnya ditindak lanjuti dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2020 tentang *Road Map* Birokrasi 2020 – 2024 di tetapkan tanggal 1 Mei 2020, diundangkan dan berlaku pada tanggal 4 Mei 2020.

Pada tanggal 31 Desember 2010 terbit Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah selanjutnya dengan terbitnya kebijakan yang diamanatkan dalam Perpres nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) kemudian ditindaklanjuti dengan Permenpan nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Ins1ansiPemerintah yang menjadikan dasar dalam penyusun Penetapan Kinerja sebagai komitmen kinerja Gubernur Jawa Timur dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana dapat dilihat pada lampiran Penetapan Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022. Penetapan Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 dijadikan acuan untuk mengukur Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 dan melaporkannya dalam LKj-IP.

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ataupun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Penetapan Kinerja (PK) Pemerintah Provinsi Jawa Timur, tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi *Actuating* dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya. Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

III.A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2022

Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja. Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja setiap sasaran, menggunakan skala pengukuran 4 (empat) katagori sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1. Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2022

NO	PERSENTASE CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75% sampai 100%	Baik
3	55% sampai 75%	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

III.B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur tahun 2022 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur tahun 2022 disajikan sebagai berikut:

TUJUAN MENINGKATKAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP INFRASTRUKTUR DASAR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN YANG LAYAK HUNI DAN BERKELANJUTAN

Capaian kinerja tujuan Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan diukur melalui indikator kinerja Persentase capaian pelayanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak huni. Perhitungan indikator tujuan mulai Tahun 2022 direncanakan berubah menyesuaikan dengan definisi operasional pada RPJMN 2020-2024, dimana terdapat 1 (satu) untuk perhitungan indikator sebelumnya memperhitungkan capaian akses air minum layak, sanitasi layak, dan penurunan luasan permukiman kumuh, menjadi 2 (dua) indikator yang baru yaitu memperhitungkan capaian akses air minum layak, sanitasi layak, dan jumlah rumah layak huni untuk mendapatkan capaian pelayanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak huni dan memperhitungkan jumlah sengketa/konflik/perkara yang dilakukan mediasi pada tahun berjalan untuk mendapatkan tingkat pengurangan sengketa tanah. Pada tahun 2022 realisasi indikator kinerja tujuan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2. Pencapaian Kinerja Tujuan Tahun 2022

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4	5
Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan	Persentase capaian pelayanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak huni	83,56%	80,82%	88,17%
	Persentase Kasus Sengketa Yang Termediasi	50%	100%	200%

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov Jatim

Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Tahun 2021 dan 2022

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Th. 2022	REALISASI	
			Th. 2021	Th. 2022
1	2	3	4	5
Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan	Persentase capaian pelayanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak huni	83,56%	80,97%	80,82%
	Persentase Kasus Sengketa Yang Termediasi	50%	0	100%

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov Jatim

Pencapaian Tujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan didukung 2 (dua) sasaran yaitu:

1. SASARAN MENINGKATNYA KONTRIBUSI TERHADAP PEMENUHAN KEBUTUHAN HUNIAN DAN PERMUKIMAN YANG LAYAK

Capaian kinerja sasaran meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak dapat dijabarkan dalam indikator sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.4. Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kontribusi Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Hunian Dan Permukiman Yang Layak Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4	5
Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak	Persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni	69,80%	66,28%	87,88%

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov Jatim

Tabel 3.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kontribusi Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Hunian Dan Permukiman Yang Layak Tahun 2021 dan 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET Th. 2022	REALISASI	
			Th. 2021	Th. 2022
1	2	3	4	5
Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak	Persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni	69,80%	66,93%	66,28%

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov Jatim

Tabel 3.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kontribusi Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Hunian Dan Permukiman Yang Layak Tahun 2022 dengan Target Akhir Periode Renstra 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2022	TARGET AKHIR RENSTRA 2024	% CAPAIAN
1	2	3	4	5
Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak	Persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni	66,28%	75,44%	87,86%

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov Jatim

Tabel 3.7. Alokasi Anggaran Sasaran Meningkatnya Kontribusi Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Hunian Dan Permukiman Yang Layak Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp)	% ANGGARAN
Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak	Persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni	1.371.736.700.825	69,80%

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov Jatim

Tabel 3.8. Pencapaian Kinerja Dan Anggaran Sasaran Meningkatnya Kontribusi Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Hunian Dan Permukiman Yang Layak Tahun 2022

SASARAN	KINERJA				ANGGARAN		
	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak	Persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni	69,80%	66,28%	94,96%	1.371.736.700.825	1.205.496.933.169	87,88%

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov Jatim

Tabel 3.9. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5
Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak	Persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni	94,96%	87,88%	7,08%

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov Jatim

Rumah yang layak huni merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat untuk dapat hidup dengan layak dan sehat. Dalam mewujudkan rumah yang layak huni perlu diperhatikan kecukupan minimal beberapa aspek/indikator pendukungnya, yaitu :

1. Aspek ketahanan bangunan. Bahan material serta struktur bangunan harus menggunakan material dan struktur yang tahan terhadap gempa dan mampu melindungi penghuninya dari cuaca di luar rumah.
2. Aspek luas bangunan. Luasan bangunan minimal memiliki luasan lebih dari 7,2 m²/jiwa. Dengan luasan minimal tersebut diharapkan cukup tersedia ruang bagi penghuninya untuk beraktivitas di dalamnya dengan baik. Kecukupan ruang ini juga diharapkan dapat memberikan sirkulasi udara dan pencahayaan yang cukup di dalam rumah.
3. Aspek ketersediaan air minum layak. Air minum layak merupakan kebutuhan dasar yang harus tersedia untuk masyarakat. Kebutuhan air minum layak yang digunakan untuk keperluan mandi, cuci, minum maupun memasak.
4. Aspek ketersediaan sanitasi layak. Sanitasi layak juga merupakan kebutuhan dasar yang harus tersedia terutama untuk menjamin kesehatan lingkungan masyarakat. Tersedianya MCK yang memadai serta pengelolaan drainase dan persampahan yang baik harus tersedia.

Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat serta angka pernikahan yang juga terus bertambah menjadikan angka kebutuhan perumahan yang harus tersedia juga makin meningkat pula. Harga rumah yang setiap tahun makin meningkat, seiring makin terbatas pula lahan yang dapat dikembangkan sebagai kawasan perumahan juga merupakan fakta yang tidak dapat dihindari. Jumlah rumah tangga/KK yang belum memiliki rumah setiap tahunnya mengalami peningkatan karena faktor tersebut. Dalam mewujudkan ketersediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat, pemerintah Provinsi Jawa Timur salah satunya melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya melaksanakan

program – program prioritas dalam pemenuhan infrastruktur dasar perumahan permukiman di antaranya:

A. Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA)

Mulai tahun 2010, pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal yang layak. Hingga tahun 2022 pemerintah Provinsi Jawa Timur telah memiliki dan sekaligus sebagai pengelola 5 (lima) RUSUNAWA yaitu :

Tabel 3.10. Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur

NO	RUSUNAWA	TAHUN PEMBANGUNAN	PENDANAAN	JUMLAH	PERUNTUKAN
1	Rusunawa Gunungsari	2010	APBD Prov	3 Twin Blok	Warga Stren KaliJagir
2	Rusunawa SIER	2011/2012	APBD Prov	1 Twin Blok	Pekerja/Buruh SIER
3	Rusunawa Jemundo (Puspa Agro)	2011/2012	APBD Prov	2 Twin Blok	Sementara untukmenampung Pengungsi Sampang
4	Rusunawa Sumur Welut	2013/2014	APBN	4 Twin Blok	Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
		2015	APBN	1,5 Twin Blok	
		2016	APBD Prov	PSU	
5	Rusunawa Gunung Anyar	2015	APBD Prov	0,5 TwinBlok	Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
		2015	APBN	2 Twin Blok	
		2016	APBD Prov	0,5 TwinBlok	

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov Jatim

B. Pembangunan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) pada perumahan untuk mendukung tersedianya rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang terjangkau.

Bantuan pembangunan prasarana sarana utilitas (PSU) perumahan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya berupa pembangunan jalan lingkungan maupun drainase lingkungan perumahan. Pembangunan PSU ini bertujuan mendukung program penyediaan satu juta rumah yang dicanangkan secara nasional yaitu dengan membantu terwujudnya penyediaan rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam kurun waktu 2015 hingga 2022, telah terbangun PSU di 124 lokasi perumahan di seluruh Jawa Timur terdiri dari:

Tabel 3.11. Jumlah perumahan yang dibantu pembangunan PSU nya untuk mendukung terwujudnya rumah bersubsidi di Jawa Timur Tahun 2015-2022

No	Tahun	Jumlah Perumahan yang terbangun PSUnya
1	2015	22 perumahan
2	2016	10 perumahan
3	2017	12 perumahan
4	2018	6 perumahan
5	2019	9 perumahan
6	2020	10 perumahan
7	2021	42 perumahan
8	2022	13 perumahan
Jumlah		124 perumahan

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov Jatim

Angka rumah tangga yang memiliki rumah menurut Provinsi Jawa Timur dalam angka Tahun 2022 (Sumber BPS diolah) dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

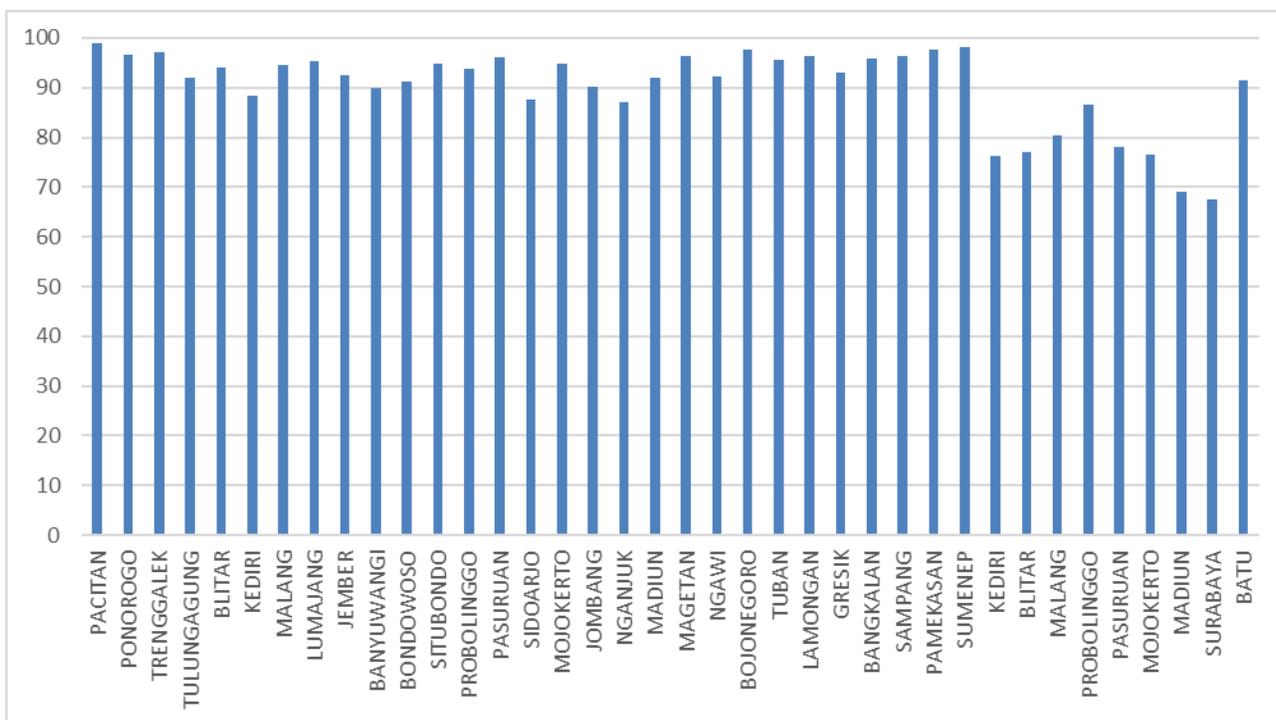
Tabel 3.12. Jumlah rumah tangga di Jawa Timur menurut status kepemilikan tempat tinggalnya Tahun 2022

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Rumah Tangga	Status Rumah yang Ditempati								Total (%)
			Milik Sendiri	%	Kontrak/ Sewa	%	Bebas Sewa	%	Dinas	%	
1	PACITAN	166,356	164,709	99.01	-	0.00	1,647	0.99	-	0.00	100.00
2	PONOROGO	271,776	262,644	96.64	2,093	0.77	7,039	2.59	-	0.00	100.00
3	TRENGGALEK	211,852	206,068	97.27	890	0.42	4,873	2.30	-	0.00	100.00
4	TULUNGAGUNG	310,483	285,272	91.88	3,912	1.26	21,299	6.86	-	0.00	100.00
5	BLITAR	355,797	334,556	94.03	4,447	1.25	15,050	4.23	1,743	0.49	100.00
6	KEDIRI	446,132	394,158	88.35	6,514	1.46	45,461	10.19	-	0.00	100.00
7	MALANG	729,749	689,467	94.48	10,362	1.42	29,920	4.10	-	0.00	100.00
8	LUMAJANG	316,354	302,023	95.47	4,176	1.32	9,649	3.05	506	0.16	100.00
9	JEMBER	732,924	677,148	92.39	10,261	1.40	45,515	6.21	-	0.00	100.00
10	BANYUWANGI	517,819	465,571	89.91	7,612	1.47	42,047	8.12	2,589	0.50	100.00
11	BONDOWOSO	256,294	233,561	91.13	5,485	2.14	16,710	6.52	538	0.21	100.00
12	SITUBONDO	220,789	209,175	94.74	3,157	1.43	8,324	3.77	110	0.05	100.00
13	PROBOLINGGO	327,078	306,930	93.84	2,126	0.65	17,891	5.47	164	0.05	100.00
14	PASURUAN	440,348	423,042	96.07	4,624	1.05	11,889	2.70	793	0.18	100.00
15	SIDOARJO	560,491	490,934	87.59	36,544	6.52	33,013	5.89	-	0.00	100.00
16	MOJOKERTO	302,098	286,600	94.87	4,350	1.44	10,271	3.40	906	0.30	100.00
17	JOMBANG	354,260	319,897	90.30	7,758	2.19	26,392	7.45	248	0.07	100.00
18	NGANJUK	309,967	269,950	87.09	372	0.12	38,932	12.56	682	0.22	100.00
19	MADIUN	223,767	205,955	92.04	3,289	1.47	14,522	6.49	-	0.00	100.00
20	MAGETAN	189,431	182,687	96.44	1,819	0.96	4,812	2.54	114	0.06	100.00
21	NGAWI	264,905	244,613	92.34	954	0.36	19,338	7.30	-	0.00	100.00

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Rumah Tangga	Status Rumah yang Ditempati								Total (%)
			Milik Sendiri	%	Kontrak/ Sewa	%	Bebas Sewa	%	Dinas	%	
22	BOJONEGORO	361,702	353,021	97.60	1,447	0.40	7,234	2.00	-	0.00	100.00
23	TUBAN	327,614	312,970	95.53	1,966	0.60	10,254	3.13	2,392	0.73	100.00
24	LAMONGAN	350,770	338,072	96.38	4,770	1.36	7,927	2.26	-	0.00	100.00
25	GRESIK	338,320	314,874	93.07	16,206	4.79	7,274	2.15	-	0.00	100.00
26	BANGKALAN	257,038	246,499	95.90	2,313	0.90	8,200	3.19	-	0.00	100.00
27	SAMPANG	243,087	234,336	96.40	-	0.00	8,751	3.60	-	0.00	100.00
28	PAMEKASAN	221,816	216,492	97.60	1,353	0.61	3,971	1.79	-	0.00	100.00
29	SUMENEP	341,226	334,777	98.11	3,412	1.00	3,003	0.88	-	0.00	100.00
30	KEDIRI	75,615	57,596	76.17	5,701	7.54	12,106	16.01	212	0.28	100.00
31	BLITAR	40,594	31,229	76.93	3,061	7.26	6,418	15.81	-	0.00	100.00
32	MALANG	227,385	182,977	80.47	16,508	8.14	23,102	10.16	2,797	1.23	100.00
33	PROBOLINGGO	62,187	53,829	86.56	5,062	4.46	4,963	7.98	622	1.00	100.00
34	PASURUAN	53,031	41,454	78.17	2,365	7.56	5,977	11.27	1,591	3.00	100.00
35	MOJOKERTO	35,382	27,110	76.62	2,675	6.04	6,064	17.14	67	0.19	100.00
36	MADIUN	55,966	38,639	69.04	3,380	11.22	10,857	19.40	190	0.34	100.00
37	SURABAYA	790,186	533,455	67.51	88,659	17.44	112,681	14.26	6,242	0.79	100.00
38	BATU	56,746	51,951	91.55	9,897	4.25	2,389	4.21	-	0.00	100.00
	JAWA TIMUR	11,347,335	10,324,244	91	289,520	2.55	665,764	5.87	22,506	0.2	100.00

Sumber : Susesnas, BPS diolah

Grafik 3.1. Presentase Rumah Tangga yang Memiliki Rumah Tahun 2022



C. Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu)

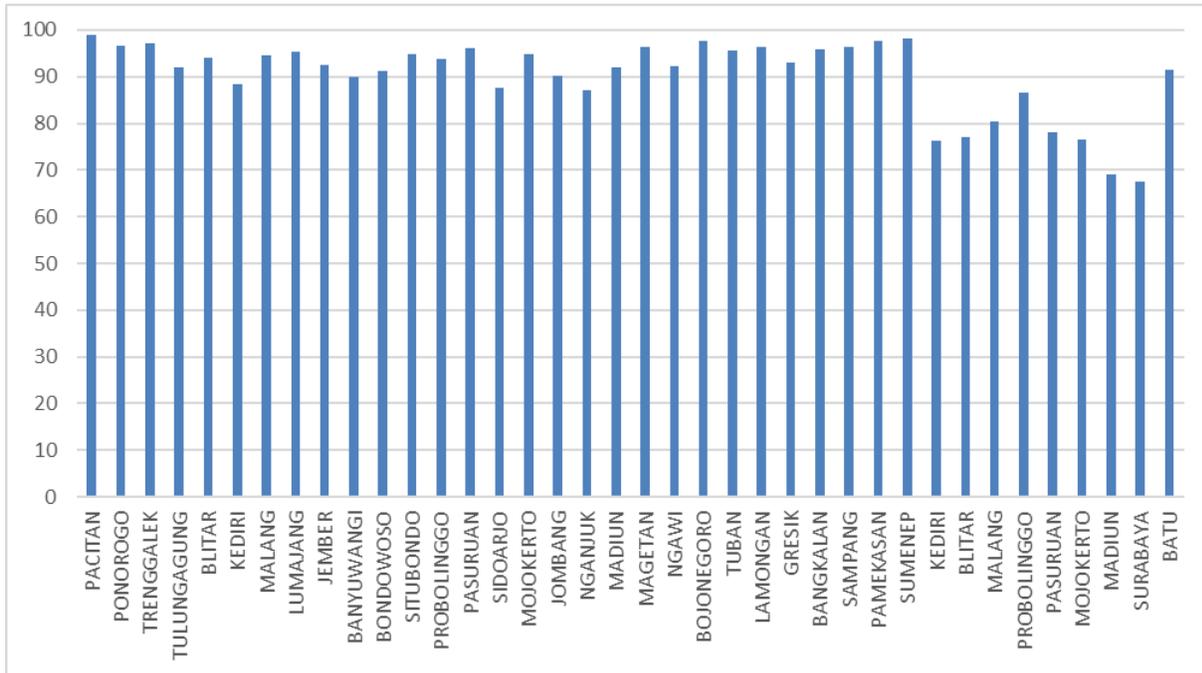
Program renovasi Rumah Layak Huni (Rutilahu) di Jawa Timur, dilaksanakan melalui kerjasama pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Kodam V Brawijaya sejak tahun 2009. Masyarakat yang menjadi program ini adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Realisasi pelaksanaan program renovasi rumah tidak layak huni dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.13. Renovasi Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2009-2022

NO.	KABUPATEN / KOTA	RENCANA KEBUTUHAN RTLH	s/d 2019	Total s/d 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	KAB. SUMENEP	6,811	5,199	5,399	200	178
2	KAB. PAMEKASAN	6,119	4,191	4,491	-	177
3	KAB. SAMPANG	6,711	4,383	4,683	200	177
4	KAB. BANGKALAN	3,344	3,692	3,942	111	178
5	KAB. JEMBER	11,116	4,916	5,166	-	-
6	KAB. BONDOWOSO	10,364	6,066	6,366	-	177
7	KAB. SITUBONDO	3,903	4,348	4,598	-	-
8	KAB./KOTA P.LINGGO	12,840	5,945	5,945	-	178
9	KAB. TRENGGALEK	6,211	4,495	4,795	-	-
10	KAB. PACITAN	13,565	8,099	8,449	200	177
11	KAB. BANYUWANGI	24,447	5,165	5,165	200	-
12	KAB. LUMAJANG	3,925	3,280	3,580	-	-
13	KAB./KOTA PASURUAN	17,657	6,250	6,250	200	-
14	KAB. JOMBANG	7,727	4,940	4,940	200	-
15	KAB./KOTA MADIUN	13,730	7,156	7,456	-	-
16	KAB. PONOROGO	37,000	6,456	6,806	-	178
17	KAB. MAGETAN	3,770	4,517	4,867	-	-
18	KAB. NGAWI	11,780	4,205	4,205	-	177
19	KAB. BOJONEGORO	9,693	5,918	5,918	-	-
20	KAB. TUBAN	6,201	5,653	6,003	-	177
21	KAB. NGANJUK	3,201	3,013	3,313	-	-
22	KAB./KOTA KEDIRI	2,575	3,032	3,332	-	-
23	KAB. TULUNGAGUNG	2,770	3,380	3,680	-	-
24	KAB./KOTA BLITAR	5,790	4,384	4,384	-	-
25	KAB./KOTA MALANG	4,389	4,483	4,783	-	-
26	KAB. SIDOARJO	2,005	1,770	1,770	-	-
27	KAB. GRESIK	6,017	5,218	5,218	-	-
28	KAB./KOTA MOJOKERTO	7,299	4,656	4,956	-	-
29	KAB. LAMONGAN	2,479	3,715	4,065	200	178
30	KOTA SURABAYA		482	482	-	-
J U M L A H		253,439			1,511	1,952

Sumber : Susesnas, BPS diolah

Grafik 3.1. Persentase Renovasi Rutilahu Tahun 2022



D. Peningkatan pelayanan Air Minum Layak melalui penanganan Desa Rawan Kekeringan dan Pengembangan SPAM Regional

Akses terhadap air minum layak sebagai kebutuhan dasar, harus dapat disediakan oleh negara kepada masyarakat. Pemerintah provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya melaksanakan beberapa kegiatan prioritas yang mendukung pemenuhan terhadap akses air minum layak pada masyarakat yaitu :

- Penanganan desa rawan kekeringan

Kegiatan ini ditujukan untuk menyediakan akses air minum layak bagi masyarakat yang berada pada desa-desa rawan kekeringan di Jawa Timur. Pelaksanaan penanganan desa rawan kekeringan mulai tahun 2014 hingga tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.14. Jumlah desa rawan kekeringan Jawa Timur yang ditangani Tahun 2014-2022

No	Tahun	Jumlah desa rawan kekeringan yang ditangani
1	2014	324 desa
2	2015	83 desa
3	2016	78 desa
4	2017	41 desa
5	2018	223 desa

No	Tahun	Jumlah desa rawan kekeringan yang ditangani
6	2019	40 desa
7	2020	88 desa
8	2021	76 desa
9	2022	87 desa
Jumlah		1.040 desa

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov Jatim

Pada tahun 2022 target desa rawan air yang ditangani adalah sebanyak 100 desa, namun hanya terealisasi 87 desa dikarenakan ada 13 lokasi tidak dilaksanakan, dikarenakan waktu tidak mencukupi.

- Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional

Pengembangan SPAM Regional yang telah di laksanakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya di antaranya adalah :

1. SPAM Regional Umbulan, memiliki sumber mata air umbulan yang berada di Kab. Pasuruan. SPAM Regional Umbulan ini memiliki kapasitas sumber air baku hingga 4.000 lt/dt dan direncanakan akan melayani 5 Kab/Kota di Jawa Timur yaitu : Kab. Pasuruan, Kota Pasuruan, Kab. Sidoarjo, Kota Surabaya dan Kab. Gresik. Pembangunan SPAM Regional Umbulan ini dilaksanakan dengan sistem KPBU bekerjasama dengan pihak swasta (PT. Meta) sebagai pelaksana dan PT. AB sebagai pengelola. Hingga tahun 2022 ini, SPAM Regional Umbulan masih pada tahap pembangunan karena masih membutuhkan tambahan jaringan distribusi utama dengan tujuan untuk mempercepat penyerapan air curah.
2. SPAM Regional Mojolagres, memanfaatkan sumber air permukaan dari sungai brantas, SPAM Regional Mojolagres ini direncanakan memiliki kapasitas hingga 300 lt/dt sampai dengan tahun 2020 ini memiliki kapasitas 200 lt/dt. Direncanakan dapat melayani 3 wilayah Kabupaten di Jawa Timur yaitu, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik. Hingga tahun 2020 ini baru bisa melayani di 2 kabupaten yaitu kabupaten Mojokerto dan Gresik, pada tahun 2022 pembangunan jaringan distribusi utama yang menuju ke Kabupaten Lamongan sudah terealisasi sehingga sudah bisa melayani sebagian ke kabupaten Lamongan. Pada tahun 2022 capaian pelayanan di kabupaten Mojokerto sebesar 70,07 lt/dt, kabupaten Gresik 56,48 lt/dt dan

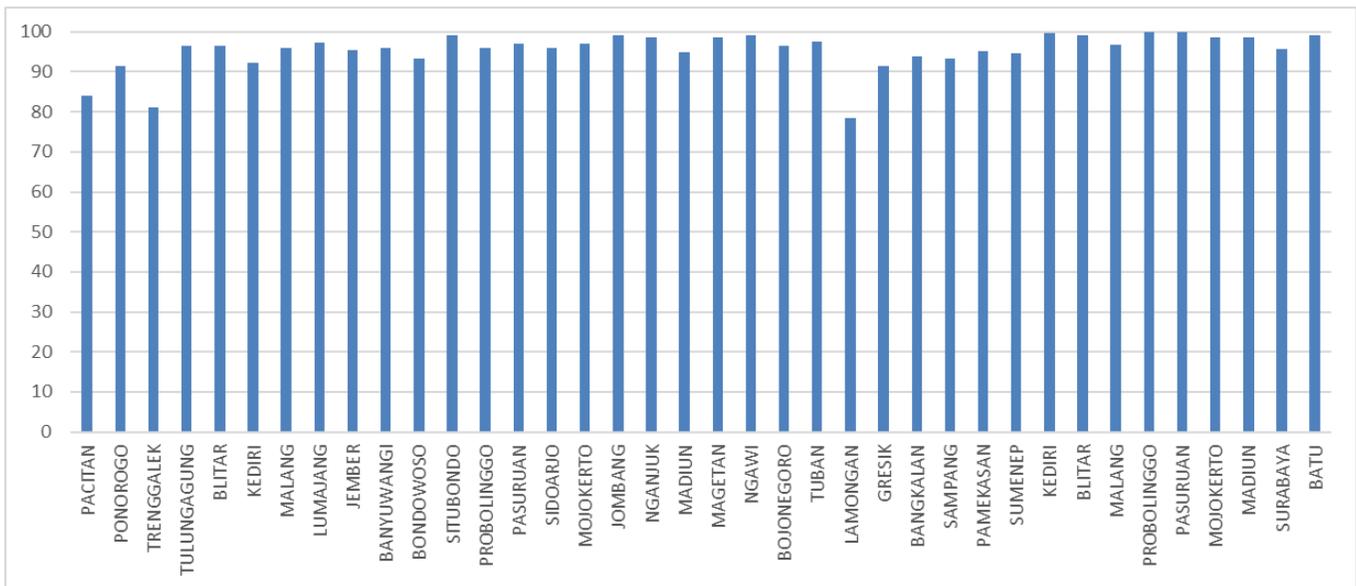
kabupaten Lamongan 19,51 lt/dt Jumlah rumah tangga di Jawa Timur yang memiliki akses terhadap air minum layak tahun 2022 dapat ditunjukkan melalui data sebagai berikut:

Tabel 3.15. Jumlah rumah tangga di Jawa Timur yang memiliki akses air minum layak Tahun 2022

NO.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH RUMAH TANGGA	AIR MINUM LAYAK			
			YA	%	TIDAK	%
1	PACITAN	166,356	139,656	83.95	26,700	16.05
2	PONOROGO	271,776	248,675	91.50	23,101	8.50
3	TRENGGALEK	211,852	172,087	81.23	39,765	18.77
4	TULUNGAGUNG	310,483	299,275	96.39	11,208	3.61
5	BLITAR	355,797	342,882	96.37	12,915	3.63
6	KEDIRI	446,132	411,200	92.17	34,932	7.83
7	MALANG	729,749	700,705	96.02	29,044	3.98
8	LUMAJANG	316,354	307,971	97.35	8,383	2.65
9	JEMBER	732,924	699,209	95.40	33,715	4.60
10	BANYUWANGI	517,819	496,951	95.97	20,868	4.03
11	BONDOWOSO	256,294	239,148	93.31	17,146	6.69
12	SITUBONDO	220,789	219,067	99.22	1,722	0.78
13	PROBOLINGGO	327,078	313,733	95.92	13,345	4.08
14	PASURUAN	440,348	426,697	96.90	13,651	3.10
15	SIDOARJO	560,491	537,287	95.86	23,204	4.14
16	MOJOKERTO	302,098	293,186	97.05	8,912	2.95
17	JOMBANG	354,260	350,965	99.07	3,295	0.93
18	NGANJUK	309,967	305,844	98.67	4,123	1.33
19	MADIUN	223,767	212,109	94.79	11,658	5.21
20	MAGETAN	189,431	186,987	98.71	2,444	1.29
21	NGAWI	264,905	262,680	99.16	2,225	0.84
22	BOJONEGORO	361,702	349,079	96.51	12,623	3.49
23	TUBAN	327,614	319,456	97.51	8,158	2.49
24	LAMONGAN	350,770	275,565	78.56	75,205	21.44
25	GRESIK	338,320	309,563	91.50	28,757	8.50
26	BANGKALAN	257,038	241,384	93.91	15,654	6.09
27	SAMPANG	243,087	226,679	93.25	16,408	6.75
28	PAMEKASAN	221,816	211,258	95.24	10,558	4.76
29	SUMENEP	341,226	322,800	94.60	18,426	5.40
30	KEDIRI	75,615	75,441	99.77	174	0.23
31	BLITAR	40,594	40,229	99.10	365	0.90
32	MALANG	227,385	220,018	96.76	7,367	3.24
33	PROBOLINGGO	62,187	62,187	100.00	-	-
34	PASURUAN	53,031	53,031	100.00	-	-
35	MOJOKERTO	35,382	34,904	98.65	478	1.35
36	MADIUN	55,966	55,149	98.54	817	1.46
37	SURABAYA	790,186	755,892	95.66	34,294	4.34
38	BATU	56,746	56,247	99.12	499	0.88
	JAWA TIMUR	11,347,335	10,775,194	95,05	572,141	5.04

Sumber : BPS, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov. Jatim

Grafik 3.2. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak Tahun 2022



Capaian Air Minum Layak Tahun 2022 adalah hasil penjumlahan dari capaian air minum Kabupaten/Kota 95,05% ditambah capaian SPAM Regional Umbulan dan Mojolagres 2,90%, dengan demikian capaian air minum layak Provinsi Jawa Timur di tahun 2022 sebesar 97,95%.

E. Peningkatan Pelayanan Sanitasi Layak

Akses terhadap sanitasi layak juga merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus disediakan oleh negara. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya melaksanakan kegiatan pembangunan sarana prasarana sanitasi sebagai dukungan peningkatan pelayanan akses sanitasi khususnya bagi masyarakat Jawa Timur. Jumlah rumah tangga di Jawa Timur yang memiliki akses terhadap sanitasi layak pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

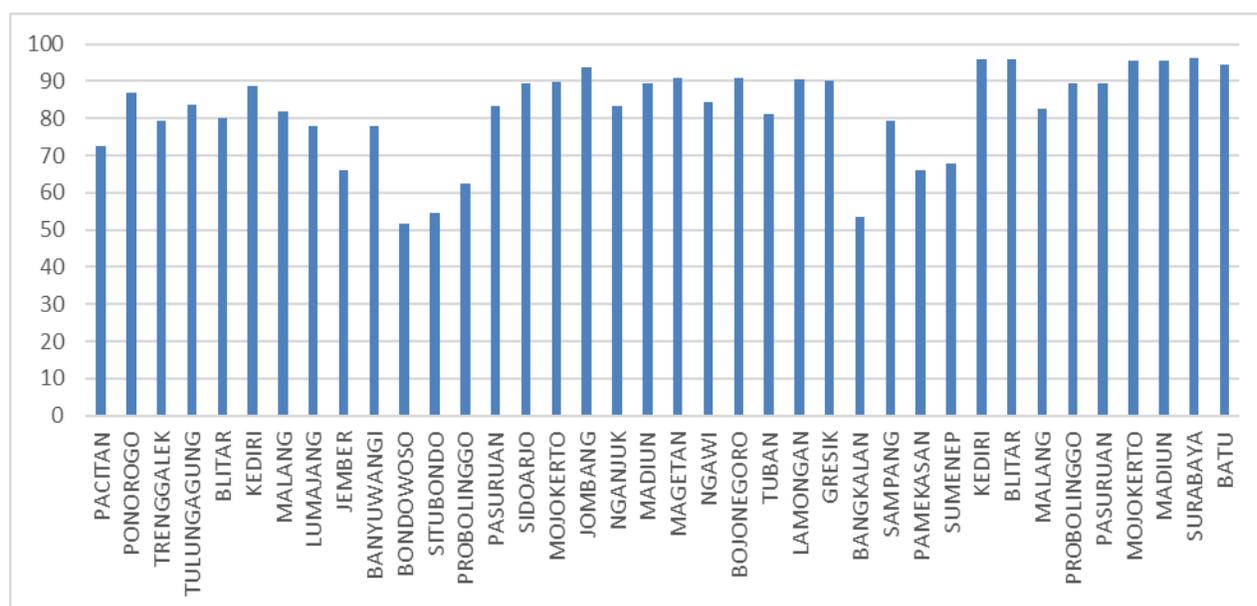
Tabel 3.16. Persentase RT yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak menurut Provinsi dan Kab/kota, 2022

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga	Sanitasi Layak			
			Ya	%	Tidak	%
1	PACITAN	166,356	120,841	72.64	45,515	27.36
2	PONOROGO	271,776	235,820	86.77	35,956	13.23
3	TRENGGALEK	211,852	167,935	79.27	43,917	20.73
4	TULUNGAGUNG	310,483	259,564	83.6	50,919	16.4
5	BLITAR	355,797	285,029	80.11	70,768	19.89
6	KEDIRI	446,132	395,630	88.68	50,502	11.32
7	MALANG	729,749	596,935	81.8	132,814	18.2
8	LUMAJANG	316,354	246,724	77.99	69,630	22.01
9	JEMBER	732,924	483,363	65.95	249,561	34.05
10	BANYUWANGI	517,819	404,261	78.07	113,558	21.93
11	BONDOWOSO	256,294	132,350	51.64	123,944	48.36

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga	Sanitasi Layak			
			Ya	%	Tidak	%
12	SITUBONDO	220,789	120,374	54.52	100,415	45.48
13	PROBOLINGGO	327,078	203,966	62.36	123,112	37.64
14	PASURUAN	440,348	367,250	83.4	73,098	16.6
15	SIDOARJO	560,491	501,864	89.54	58,627	10.46
16	MOJOKERTO	302,098	271,495	89.87	30,603	10.13
17	JOMBANG	354,260	331,835	93.67	22,425	6.33
18	NGANJUK	309,967	258,388	83.36	51,579	16.64
19	MADIUN	223,767	200,048	89.4	23,719	10.6
20	MAGETAN	189,431	172,401	91.01	17,030	8.99
21	NGAWI	264,905	223,209	84.26	41,696	15.74
22	BOJONEGORO	361,702	329,185	91.01	32,517	8.99
23	TUBAN	327,614	265,335	80.99	62,279	19.01
24	LAMONGAN	350,770	318,008	90.66	32,762	9.34
25	GRESIK	338,320	305,469	90.29	32,851	9.71
26	BANGKALAN	257,038	137,464	53.48	119,574	46.52
27	SAMPANG	243,087	192,841	79.33	50,246	20.67
28	PAMEKASAN	221,816	146,288	65.95	75,528	34.05
29	SUMENEP	341,226	230,942	67.68	110,284	32.32
30	KEDIRI	75,615	72,492	95.87	3,123	4.13
31	BLITAR	40,594	38,934	95.91	1,660	4.09
32	MALANG	227,385	187,843	82.61	39,542	17.39
33	PROBOLINGGO	62,187	55,514	89.27	6,673	10.73
34	PASURUAN	53,031	47,367	89.32	5,664	10.68
35	MOJOKERTO	35,382	33,822	95.59	1,560	4.41
36	MADIUN	55,966	53,380	95.38	2,586	4.62
37	SURABAYA	790,186	761,818	96.41	28,368	3.59
38	BATU	56,746	53,551	94.37	3,195	5.63
	JAWA TIMUR	11,347,335	9,209,537	81.16	2,137,798	18.84

Sumber : BPS, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov. Jatim

Grafik 3.3. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak Tahun 2022



F. Penanganan Permukiman Kumuh

Tingginya tingkat urbanisasi yang terjadi, menimbulkan permasalahan permukiman di perkotaan dengan munculnya kawasan – kawasan kumuh terutama pada daerah dengan kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Begitu juga pada kawasan – kawasan yang tidak diperuntukkan untuk permukiman penduduk, akhirnya muncul permukiman liar yang sangat padat dan tidak tertata dengan baik seperti di sekitar bantaran sungai atau sepanjang rel kereta api. Pemerintah sangat memperhatikan penanganan kawasan kumuh, ditargetkan pada tahun 2024 sudah tidak ada lagi permukiman kumuh di perkotaan, bahkan dipertegas lagi pada konsep RPJMN 2019 – 2024 bidang cipta karya bahwa pada tahun 2024 seluruh kawasan kumuh harus sudah tertangani. Penuntasan kawasan kumuh di kawasan perkotaan ini memang sangat perlu perhatian yang serius, dengan perkembangan yang cepat dan aglomerasi perkotaan di kawasan ini semakin tinggi tentu menjadikan kebutuhan akan pemukiman dan tempat tinggal semakin tinggi juga. Sesuai dengan SK Bupati/Walikota, pada tahun 2020 jumlah luasan kawasan kumuh Provinsi Jawa Timur adalah sebesar 11.151,06 Ha yang harus ditangani secara bersama-sama baik oleh Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Sedangkan pada tahun 2022 Provinsi Jawa Timur telah berkontribusi dalam penanganan kumuh seluas 8 Ha pada 7 Kabupaten (Kab. Tulungagung, Kab. Lamongan, Kab. Nganjuk, Kab. Jombang, Kab. Ponorogo, Kab. Kediri, dan Kab. Sidoarjo).

Tabel 3.17 Luas Kawasan Kumuh Perkotaan Sesuai SK Bupati/Walikota

No	Kabupaten/Kota	Luas Kumuh SK** (Ha)	Capaian Pengurangan Kumuh Tahun 2021 (Ha)	Sisa Luas Kumuh di Akhir Tahun 2021 (Ha)
1	PACITAN	67.00	0.00	67.00
2	PONOROGO	87.09	27.16	59.93
3	TRENGGALEK	54.63	14.37	40.26
4	TULUNGAGUNG	239.49	19.19	220.30
5	BLITAR *)	670.79	275.40	395.39
6	KEDIRI	218.74	1.18	217.56
7	MALANG	104.35	0.44	103.91
8	LUMAJANG	1417.03	5.33	1411.70
9	JEMBER	1324.25	0.00	1324.25

No	Kabupaten/Kota	Luas Kumuh SK** (Ha)	Capaian Pengurangan Kumuh Tahun 2021 (Ha)	Sisa Luas Kumuh di Akhir Tahun 2021 (Ha)
10	BANYUWANGI *)	1309.90	353.99	955.91
11	BONDOWOSO	489.79	1.92	487.87
12	SITUBONDO	180.18	0.00	180.18
13	PROBOLINGGO	196.87	0.00	196.87
14	PASURUAN *)	169.51	11.34	158.17
15	SIDOARJO *)	109.44	66.05	43.39
16	MOJOKERTO	430.82	9.70	421.12
17	JOMBANG	475.01	12.46	462.55
18	NGANJUK	131.20	4.04	127.16
19	MADIUN	104.44	36.67	67.77
20	MAGETAN	430.82	12.13	418.69
21	NGAWI	131.00	0.00	131.00
22	BOJONEGORO *)	140.05	2.08	137.97
23	TUBAN *)	0.00	0.00	0.00
24	LAMONGAN	394.55	87.88	306.67
25	GRESIK *)	89.39	0.00	89.39
26	BANGKALAN *)	367.38	9.14	358.24
27	SAMPANG *)	575.22	0.00	575.22
28	PAMEKASAN	244.75	0.00	244.75
29	SUMENEP	216.63	37.39	179.24
30	KOTA KEDIRI	106.16	29.23	76.93
31	KOTA BLITAR	103.36	0.00	103.36
32	KOTA MALANG *)	214.89	142.56	72.33
33	KOTA PROBOLINGGO	53.14	0.00	53.14
34	KOTA PASURUAN	58.08	0.00	58.08
35	KOTA MOJOKERTO	40.16	0.00	40.16
36	KOTA MADIUN	64.49	12.08	52.41
37	KOTA SURABAYA *)	0.00	0.00	0.00
38	KOTA BATU	140.46	0.00	140.46
JAWA TIMUR		11.151,06	1.171,73	9.979,33

Sumber : SK Bupati/Walikota Jawa Timur

Catatan Keterangan *) :

1. Kabupaten/kota yang belum menerbitkan SK Kumuh dengan 16 parameter (sesuai Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018);

G. Tabel Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Sasaran

Secara detail pencapaian sasaran meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak didukung oleh pencapaian program dan kegiatan yang dapat dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.18. Program/Kegiatan Pendukung sasaran meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak Tahun 2022

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KINERJA		ANGGARAN	
				TARGET	REALISASI	TARGET RP	REALISASI RP
1	2	3	4	5	6	7	8
PROG RAM	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses Air Minum yang layak	Persen	97,89	97,95	181.972.352.954,00	145.768.858.318,00
KEGIATAN	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah RT yang terlayani akses air minum	Rumah Tangga	2400	2400	181.972.352.954,00	145.768.858.318,00
SUB KEG	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Pe-ruasaan/Perbaikan SPAM	Jumlah dokumen supervisi	dokumen	5	5	16.858.707.874,00	11.768.094.912,00
SUB KEG	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah infrastruktur SPAM yang dibangun	unit	100	87	101.152.999.000,00	94.891.311.171,00
SUB KEG	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah infrastruktur SPAM yang dikembangkan	unit	2	2	63.438.682.575,00	39.002.366.825,00
SUB KEG	Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi	Jumlah orang yang mendapatkan pembinaan Pengelolaan SPAM	Orang	400	200	521.963.505,00	107.085.410,00
PROG RAM	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase sistem persampahan regional yang dikembangkan	Persen	12,19	6,22	5.292.589.770,00	3.111.204.440,00
KEGIATAN	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Jumlah sistem persampahan yang dikembangkan	sistem	4	4	5.292.589.770,00	3.111.204.440,00
SUB KEG	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen persampahan	dokumen	5	4	2.327.137.470,00	2.268.389.852,00
SUB KEG	Penyediaan Sarana dan prasarana persampahan	Jumlah infrastruktur persampahan yang terbangun	Unit	1	1	295.398.000,00	295.398.000,00
SUB KEG	Fasilitasi Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan fasilitasi kerjasama	kab/kota	11	11	2.000.000.000,00	327.177.648,00
SUB KEG	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	Jumlah Orang yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan teknis bidang persampahan	Orang	200	238	670.054.300,00	220.238.940,00
PROG RAM	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi layak	Persen	83	81	8.982.630.184,00	8.029.632.065,00
KEGIATAN	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Jumlah jiwa yang terlayani akses air limbah	jiwa	500	0	8.982.630.184,00	8.029.632.065,00
SUB KEG	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah dokumen perencanaan, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	dokumen	3	3	2.241.377.000,00	1.820.173.765,00
SUB KEG	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Jumlah infrastruktur air limbah	unit	1	0	6.563.961.000,00	6.035.738.000,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KINERJA		ANGGARAN	
				TARGET	REALISASI	TARGET RP	REALISASI RP
1	2	3	4	5	6	7	8
SUB KEG	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah orang yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan teknis bidang air limbah domestik	Orang	150	245	177.292.184,00	173.720.300,00
PROG RAM	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase sistem drainase regional yang dikembangkan	Persen	4,17	4,17	141.467.391.092,00	132.548.481.640,00
KEGIATAN	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah akses drainase terbangun	meter	1.000	0	141.467.391.092,00	132.548.481.640,00
SUB KEG	Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah orang yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan teknis bidang drainase	Orang	100	100	89.746.092,00	75.500.000,00
SUB KEG	Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	Jumlah infrastruktur drainase	paket	10	0	141.377.645.000,00	132.472.981.640,00
PROG RAM	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Presentase Penataan Bangunan Gedung	persen	100	91,67	433.328.535.775,00	335.046.382.419,00
KEGIATAN	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	jumlah gedung yang ditetapkan dan diselenggarakan untuk kepentingan strategis daerah provinsi	gedung	48	44	433.328.535.775,00	335.046.382.419,00
SUB KEG	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah gedung yang dibangun	gedung	22	18	323.717.921.000,00	229.652.384.717,00
SUB KEG	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuaai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah gedung yang direhabilitasi	gedung	26	26	27.195.000.000,00	24.983.831.165,00
SUB KEG	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	Jumlah laporan bantuan teknis pembangunan bangunan gedung negara di provinsi Jawa Timur	Laporan	150	200	46.284.722.000,00	45.915.500.436,00
SUB KEG	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Provinsi	Jumlah dokumen identifikasi bangunan gedung cagar budaya	Dokumen	5	5	1.000.000.000,00	924.760.147,00
SUB KEG	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	Jumlah dokumen pendataan Rumah Negara	dokumen	100	100	31.780.892.775,00	31.275.997.604,00
PROG RAM	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	persen	20,00	20,00	1.675.000.000,00	1.146.954.175,00
KEGIATAN	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan yang mendapatkan penataan bangunan dan lingkungan	Kawasan	2	2	1.675.000.000,00	1.146.954.175,00
SUB KEG	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RTBL di kawasan strategis kabupaten/ kota	dokumen	2	2	1.600.000.000,00	1.123.652.300,00
SUB KEG	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan (identifikasi dan penentuan lokasi RTBL)	Dokumen	2	2	50.000.000,00	5.525.875,00
SUB KEG	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah dokumen monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Dokumen	2	2	25.000.000,00	17.776.000,00
PROG RAM	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pemberdayaan dan pengawasan pembinaan jasa konstruksi	Persen	100	100	3.697.590.225,00	3.143.492.488,00
KEGIATAN	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah orang yang mendapatkan Pemberdayaan Pembinaan jasa konstruksi	orang	1.250	1.250	3.214.728.400,00	2.764.052.713,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KINERJA		ANGGARAN	
				TARGET	REALISASI	TARGET RP	REALISASI RP
1	2	3	4	5	6	7	8
SUB KEG	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Orang yang mendapatkan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	orang	660	660	2.364.827.900,00	2.141.021.663,00
SUB KEG	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Orang yang mendapatkan Pembinaan	orang	590	590	849.900.500,00	623.031.050,00
KEGIATAN	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah orang yang mendapatkan Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi	orang	2.085	2.085	482.861.825,00	379.439.775,00
SUB KEG	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Media Informasi Jasa Konstruksi	buletin	2.000	2.000	261.329.700,00	223.962.775,00
SUB KEG	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Jumlah Orang yang mendapatkan Pelatihan	orang	85	85	221.532.125,00	155.477.000,00
PROG RAM	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	Persen	11,00	11,00	46.930.633.690,00	46.586.392.818,00
KEGIATAN	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase Kawasan Kumuh yang mendapat fasilitasi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persen	7,46	7,46	509.408.390,00	422.344.780,00
SUB KEG	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Laporan	3	3	509.408.390,00	422.344.780,00
KEGIATAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah luasan kawasan permukiman kumuh yang ditangani	Ha	8	8	46.421.225.300,00	46.164.048.038,00
SUB KEG	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Perumahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah dokumen Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Perumahan Permukiman Kumuh	Dokumen	6	6	245.000.000,00	228.537.400,00
SUB KEG	Pelaksanaan Pembangunan Perumahan/ Perumahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah panjang PSU dibangun dalam rangka peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh	Meter	1.156	1.156	5.476.225.300,00	5.239.035.638,00
SUB KEG	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah laporan monitoring pelaksanaan renovasi rumah tidak layak huni	dokumen	7	7	40.700.000.000,00	40.696.475.000,00
PROG RAM	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase kegiatan mitigasi bencana yg ditangani pada wilayah perumahan dan kawasan permukiman di jatim	Persen	3	3	300.000.000,00	298.383.000,00
KEGIATAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Identifikasi dan Pendataan Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Dokumen	3	3	300.000.000,00	298.383.000,00
SUB KEG	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen	1	1	100.000.000,00	99.450.000,00
SUB KEG	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Dokumen	1	1	100.000.000,00	99.555.000,00
SUB KEG	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat.	Dokumen	1	1	100.000.000,00	99.378.000,00
PROG RAM	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Persen	21	21	546.163.038.910,00	527.288.379.102,00
KEGIATAN	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Jumlah kawasan permukiman yang terbangun PSU	Kawasan	22	22	546.163.038.910,00	527.288.379.102,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KINERJA		ANGGARAN	
				TARGET	REALISASI	TARGET RP	REALISASI RP
1	2	3	4	5	6	7	8
SUB KEG	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman Swadaya	Dokumen	25	25	2.526.000.000,00	2.261.728.100,00
SUB KEG	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah panjang PSU lingkungan permukiman Swadaya yang dibangun	Meter	5.497,95	5.497,95	540.016.680.760,00	522.361.943.707,00
SUB KEG	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman Swadaya	Laporan	17	14	2.020.322.550,00	1.368.560.025,00
PROG RAM	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Pengujian Konstruksi dan Bahan Bangunan		82,5	83	533.345.200,00	432.049.090,00
KEGIATAN	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Persentase laporan hasil pengujian konstruksi dan bahan bangunan yang diinformasikan	Persen	80	100	533.345.200,00	432.049.090,00
SUB KEG	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah pengujian yang diinformasikan	dokumen	100	220	533.345.200,00	432.049.090,00
PROG RAM	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan pelayanan hunian rusun yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi	rumah tangga	973	939	6.343.628.625,00	5.686.779.234,00
KEGIATAN	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Persentase jumlah hunian yang dimanfaatkan dan dipelihara	Persen	100	96,5	6.343.628.625,00	5.686.779.234,00
SUB KEG	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Rusunawa yang dikelola	rusunawa	4	4	6.343.628.625,00	5.686.779.234,00
TOTAL						1.376.686.736.425,00	1.209.086.988.789,00

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov. Jatim

Dalam pencapaian sasaran meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak tentunya terdapat beberapa kendala permasalahan serta solusi yang diambil untuk mengatasinya. permasalahan yang dihadapi serta solusi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

H. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan, tentunya ada hambatan dan permasalahan yang muncul dan perlu diselesaikan untuk memaksimalkan kinerja pelayanan sesuai dengan target yang di tentukan. Permasalahan yang ada tersebut antara lain:

- Belum mantapnya kelembagaan penyelenggaraan perumahan dan permukiman.
- Terbatasnya lahan murah untuk pembangunan perumahan.
- Belum mantapnya sistem pembiayaan perumahan.
- Terbatasnya akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam memenuhi kebutuhan perumahan yang layak.
- Masih lemahnya komitmen pemerintah daerah dalam pembangunan perumahan.
- Masih rendahnya efisiensi dalam pembangunan perumahan.

- Menurunnya kualitas lingkungan permukiman dan meningkatnya luasan kawasan kumuh.
- Belum memadainya prasarana dan sarana dasar lingkungan perumahan dan permukiman.
- Menurunnya daya dukung lingkungan perumahan dan permukiman.
- Belum terintegrasinya pengembangan kawasan perumahan dengan pembangunan prasarana dan sarana kawasan.
- Lemahnya pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan untuk pembangunan perumahan dan permukiman.
- Terbatasnya penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman di kawasan tertinggal, di kepulauan terpencil dan di kawasan perbatasan.
- Belum efektifnya penerapan konsep pengendalian permukiman melalui dukungan prasarana dan sarana dasar permukiman Kasiba/Lisiba.
- Rendahnya peningkatan pelayanan Air Minum di perkotaan dan perdesaan serta khususnya untuk penduduk miskin dan daerah kekeringan.
- Rendahnya kualitas manajemen pengelolaan air minum yang dilakukan oleh PDAM.
- Permasalahan tarif air minum yang tidak mampu mengimbangi biaya produksi, sehingga tidak dapat mencapai kondisi pemulihan biaya (*cost recovery*).
- Pada beberapa daerah terjadi konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumber air baku. Hal ini disebabkan adanya kepentingan peruntukan sumber air tersebut untuk non Air Minum, maupun karena kendala batas administrasi wilayah.
- Pelayanan Air Minum non perpipaan (sebagian besar di perdesaan) belum teridentifikasi secara kuantitatif maupun kualitatif berdasarkan kondisi air yang dikonsumsi secara mandiri.
- Masih terbatasnya pelayanan pengolahan sistim air limbah terpusat (*sistim sewerage*) di perkotaan.
- Belum memadainya pelayanan sanitasi yang hal itu akan dapat memberikan kontribusi pencemaran terhadap air permukaan dan air tanah.
- Pengolahan lumpur tinja belum efektif karena masih rendahnya pemanfaatan sarana IPLT yang sudah terbangun.
- Tidak berfungsinya saluran drainase sebagai pematus air hujan, hal ini disebabkan antara lain karena masyarakat membuang sampah ke saluran drainase, akibat dari rendahnya penegakan hukum khususnya dalam perambahan badan air termasuk saluran drainase di kawasan perkotaan.
- Belum mantapnya peraturan dan standar pengelolaan drainase.

- Penanganan masalah banjir perkotaan masih secara parsial dan tidak konseptual karena terbatasnya dokumen perencanaan induk dan perencanaan detail drainase yang seharusnya dapat dipakai sebagai acuan dalam menyusun rencana tindak.
- Belum memadainya sistem dan pendanaan untuk pemeliharaan drainase.
- Belum terpadunya kerja sama antar instansi terkait maupun antar pemerintah daerah dalam penanganan drainase khususnya pengurangan luas daerah genangan atau banjir.

I. SOLUSI TERHADAP PERMASALAHAN

Permasalahan-permasalahan yang ada dalam pelayanan kepada masyarakat, tentunya harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja pelayanan Dinas kepada masyarakat Provinsi Jawa Timur. Solusi terhadap permasalahan-permasalahan tersebut antara lain:

- Peningkatan pemenuhan rumah layak huni bagi seluruh masyarakat khususnya MBR.
- Pembangunan Rusunawa.
- Upaya penataan lingkungan dan pemenuhan sarana prasarana di kawasan permukiman.
- Peran serta seluruh *stakeholder* dalam upaya mencapai sasaran pembangunan Air Minum di perkotaan dan perdesaan.
- Menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha (swasta) untuk berperan serta dalam meningkatkan pelayanan Air Minum untuk masyarakat.
- Mendorong terbentuknya regionalisasi pengelolaan Air Minum sebagai upaya meningkatkan efisiensi pelayanan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam (air baku).
- Meningkatkan kinerja pengelola air minum melalui restrukturisasi kelembagaan.
- Meningkatkan kualitas SDM pengelola pelayanan Air Minum.
- Peran serta seluruh *stakeholder* dalam upaya mencapai sasaran pembangunan Air Limbah yang layak di perkotaan dan perdesaan.
- Menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha (swasta) untuk berperan serta dalam meningkatkan pelayanan Air Limbah yang layak untuk masyarakat.
- Meningkatkan kualitas SDM pengelola pelayanan Air Limbah yang layak.
- Kerja sama antar instansi terkait maupun antar pemerintah daerah dalam penanganan drainase khususnya pengurangan luas daerah genangan atau banjir.

2. SASARAN TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG YANG BERKELANJUTAN

Penyelenggaraan penataan ruang Provinsi sebagaimana diampu oleh Bidang Penataan Ruang Wilayah memiliki sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Penataan Ruang yang berkelanjutan. Sasaran tersebut dihitung pencapaiannya melalui indikator sasaran kinerja sebagai berikut.

Tabel 3.19. Pencapaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Yang Berkelanjutan Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4	5
Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan	Persentase kesesuaian rencana tata ruang	88,00%	92,53%	94,51%

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov Jatim

Tabel 3.20. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Yang Berkelanjutan Tahun 2021 dan 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	
			Th. 2021	Th. 2022
1	2	3	4	5
Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan	Persentase kesesuaian rencana tata ruang	88,00%	87,60%	92,53%

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov Jatim

Tabel 3.21. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Yang Berkelanjutan Tahun 2022 dengan Target Akhir Periode Renstra 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2022	TARGET AKHIR RENSTRA 2024	% CAPAIAN
1	2	3	4	5

Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan	Persentase kesesuaian rencana tata ruang	92,53%	87,50%	105,75 %
---	--	--------	--------	----------

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov Jatim

Tabel 3.22. Alokasi Anggaran Sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Yang Berkelanjutan Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp)	% ANGGARAN
Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan	Persentase kesesuaian rencana tata ruang	9.198.070.000	88,00%

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov Jatim

Tabel 3.23. Pencapaian Kinerja Dan Anggaran Sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Yang Berkelanjutan Tahun 2022

SASARAN	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan	Persentase kesesuaian rencana tata ruang	88,00%	92,53%	105,15%	9.198.070.000	8.693.500.347	94,51%

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov Jatim

Tabel 3.24. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5
Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan	Persentase kesesuaian rencana tata ruang	105,15%	94,51%	10,64%

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov Jatim

Persentase kesesuaian rencana tata ruang merupakan capaian kinerja penyelenggaraan ruang, meliputi penyelenggaraan perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dengan ditetapkannya Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, diharapkan rencana program pembangunan dapat disinkronisasikan melalui arahan pengembangan kewilayahan yang secara spasial tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur. Kinerja persentase kesesuaian rencana tata ruang dianggap dapat mewakili upaya penyelenggaraan penataan ruang yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yaitu dengan membandingkan kesesuaian kondisi eksisting

pemanfaatan lahan (diidentifikasi melalui peta citra terbaru) dengan Rencana Pola Ruang yang ditetapkan dalam Perda RTRW Provinsi yang berlaku, dalam hal ini Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012. Berdasarkan penghitungan pada Tahun 2022, didapatkan persentase kesesuaian rencana ruang sebesar 92,53% dari seluruh wilayah daratan Provinsi Jawa Timur. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan pemanfaatan ruang di lapangan sudah cukup sesuai dengan rencana pola ruang yang telah ditetapkan. Adapun ketidaksesuaian peruntukan ruang masih teridentifikasi di lapangan mengingat adanya perubahan kebijakan terhadap rencana penggunaan lahan, seperti perubahan penggunaan pada kawasan hutan untuk kepentingan umum, serta perkembangan dari hasil pembangunan proyek strategis nasional yang telah terbangun. Adanya dinamika pembangunan yang terjadi pasca penetapan Proyek Strategis Nasional dan Undang – Undang Cipta Kerja kemudian mendasari prioritas penetapan Revisi RTRW Provinsi Jawa Timur. Serta dalam rangka optimalisasi urusan penataan ruang Pemerintah Provinsi, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang tetap menjadi prioritas program dan kegiatan rutin setiap tahunnya. Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan melalui fasilitasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, pendampingan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan Rencana Tata Ruang, serta penyusunan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang dalam rangka menjamin sinkronisasi Rencana Tata Ruang dengan Rencana Pembangunan Sektoral. Pengendalian pemanfaatan Ruang dilaksanakan dalam bentuk penyusunan Penilaian Pelaksanaan Penataan Ruang serta penyusunan Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam bentuk insentif disinsentif dan sanksi administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang.

A. Penyusunan Revisi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Tahun 2011-2031

Pada saat ini sedang dilaksanakan Penyusunan Revisi Perda RTRW Provinsi Jawa Timur sebagai amanat Undang – Undang Nomor 26/2007 tentang Penataan Ruang dan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pada Tahun 2022, telah dilaksanakan Integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (RZWP-3-K) ke dalam dokumen Rancangan Perda RTRW Provinsi Jawa Timur. Dalam rangka penetapan Perda RTRW Provinsi, terdapat beberapa mekanisme tahapan yang harus dilalui, saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan Rapat Pra-Lintas Sektor pembahasan RTRW Provinsi Jawa Timur di Kementerian ATR/Kepala BPN bersama dengan Kementerian/Lembaga, serta instansi terkait. Sebagai salah satu persyaratan keterlibatan masyarakat, telah dilaksanakan Konsultasi Publik RTRW Provinsi dan Rapat Sinkronisasi RTRW Provinsi dengan instansi terkait. Beberapa dokumen pelengkap permohonan persetujuan substansi

juga telah didapatkan, antara lain Surat Keterangan Persetujuan Penggunaan Peta Dasar RTRW Provinsi oleh BIG, serta Berita Acara Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RTRW Provinsi Jawa Timur. Beberapa hal tersebut diatas menjadi persyaratan permohonan Substansi RTRW Provinsi Jawa Timur kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. RTRW Provinsi Jawa Timur ditargetkan untuk dapat ditetapkan menjadi Perda pada Tahun 2023.

B. Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang Provinsi Jawa Timur

Dalam rangka mendukung pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang berbasis jaringan sistem elektronik sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dibangun Sistem Informasi Tata Ruang Provinsi Jawa Timur berupa website “Jatim PINTAR” (Pelayanan Informasi Tata Ruang). Dalam website dimaksud, terdapat beberapa fitur berupa informasi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur berbasis spasial, Informasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang sesuai RTRW Provinsi Jawa Timur, Progres Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Timur, e-Library yang memuat peraturan perundangan terkait tata ruang, dan Berita Tata Ruang.

C. Evaluasi Rancangan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota

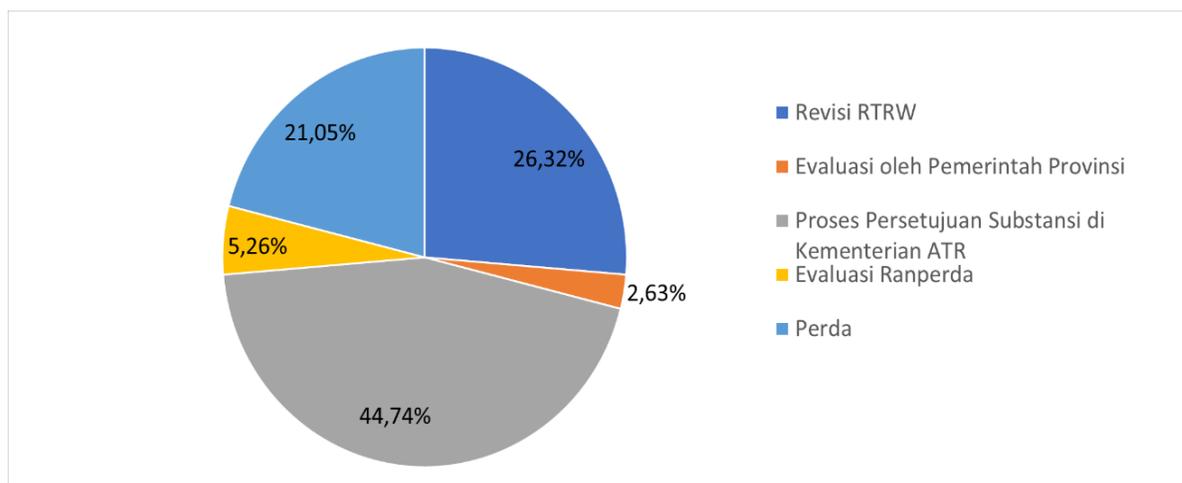
Terkait pendampingan penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota, dari 29 Kabupaten dan 9 Kota, 8 Kabupaten/Kota yang telah menetapkan RTRW dalam bentuk Perda hingga akhir Tahun 2022 yaitu Kota Probolinggo, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kota Pasuruan, dan Kota Malang. Dalam proses penetapan Perda RTRW Kabupaten/Kota, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui antara lain: (1) Revisi RTRW oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, (2) Evaluasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, (3) Proses Persetujuan Substansi di Kementerian ATR, (4) Evaluasi Ranperda, dan (5) Penetapan Perda. Tabel dan Grafik berikut merupakan diagram progress Penetapan Perda RTRW Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Tahapan Penetapan Perda	Jumlah Kab/Kota	Persentase
Revisi RTRW	10	26,32%
Evaluasi oleh Pemerintah Provinsi	1	2,63%
Proses Persetujuan Substansi di Kementerian ATR	17	44,74%

Evaluasi Ranperda	2	5,26%
Perda	8	21,05%
TOTAL	38	100%

Tabel 3.25. Progress Penetapan Perda RTRW Kabupaten/Kota Tahun 2022

Grafik 3.4. Persentase Tahapan Penetapan Perda RTRW Kabupaten/Kota Tahun 2022



D. Penyusunan Dokumen Sinkronisasn Program Pemanfaatan Ruang

Sebagai upaya mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya, pada Tahun 2022 disusun dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) Provinsi Jawa Timur jangka menengah 5 (lima) tahunan dan SPPR jangka pendek 1 (satu) Tahunan. Dokumen SPPR mengidentifikasi keterlaksanaan dari Rencana Indikasi Program Utama di RTRW Provinsi dengan Rencana Program Sektorial yang tertuang dalam RPJMD, RKPD, maupun Rencana Strategis (Renstra) yang disusun oleh Perangkat Daerah terkait.

E. Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Dalam rangka memastikan pelaksanaan pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku, pengendalian pemanfaatan ruang

dilaksanakan dengan Menyusun kajian Alternatif Pemberian Insentif-Disinsentif Bidang Penataan Ruang dan penyiapan sistem informasinya. Selain itu, dilakukan Fasilitasi Penertiban dan Penegakan Hukum melalui optimalisasi (Pengawas Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tata ruang pada 8 (delapan) lokasi sesuai dengan pengajuan, serta audit tata ruang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Terkait dengan Izin Pemanfaatan Ruang (IPD) yang telah diterbitkan sebelum mekanisme perizinan baru sesuai PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, pada Tahun 2022 telah dilaksanakan pemantauan dan evaluasi IPR sekaligus penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebanyak 21 (dua puluh satu) kegiatan.

D. Tabel Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Sasaran

Secara detail pencapaian sasaran terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan didukung oleh pencapaian program dan kegiatan yang dapat dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.26. Program/Kegiatan Pendukung sasaran terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan Tahun 2022

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KINERJA		ANGGARAN	
				TARGET	REALISASI	TARGET RP	REALISASI RP
1	2	3	4	5	6	7	8
PROGRAM	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Indeks Kepuasan Layanan Informasi Tata Ruang	-	78	78	6.108.460.000,00	5.666.670.458,00
KEGIATAN	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Persentase Kebijakan Rencana dan Program dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Persen	60	60	2.870.108.000,00	2.667.511.708,00
SUB KEG	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Persentase Progress Penetapan Perda RTRW Provinsi	Persen	85	75	2.361.848.000,00	2.187.540.882,00
SUB KEG	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Kebijakan Rencana dan Program dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	1	1	393.660.000,00	381.086.686,00
SUB KEG	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah orang yg mendapatkan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Orang	100	100	114.600.000,00	98.884.140,00
KEGIATAN	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang yang dilakukan	Kegiatan	10	69	828.000.000,00	794.134.700,00
SUB KEG	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Teknis Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	Dokumen	10	69	828.000.000,00	794.134.700,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KINERJA		ANGGARAN	
				TARGET	REALISASI	TARGET RP	REALISASI RP
1	2	3	4	5	6	7	8
KEGIATAN	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi yang dilakukan	Kegiatan	2	2	1.295.552.000,00	1.240.419.558,00
SUB KEG	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pemanfaatan ruang daerah yang disusun	Dokumen	2	2	1.018.400.000,00	967.751.712,00
SUB KEG	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Informasi Tata Ruang yang dipublikasikan	Konten	10	10	277.152.000,00	272.667.846,00
PROGRAM	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase dokumen Penatagunaan Tanah yang tersusun	Persen	62	62	1.114.800.000,00	964.604.492,00
KEGIATAN	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah	Dokumen	2	2	1.114.800.000,00	964.604.492,00
SUB KEG	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah	Kegiatan	2	2	1.114.800.000,00	964.604.492,00
PROGRAM	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Presentase fasilitasi penyelesaian sengketa, konflik dan perkara pertanahan dalam 1 (satu) daerah Provinsi	persen	100	100	223.832.000,00	180.682.910,00
KEGIATAN	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang terfasilitasi	Kasus	10	10	223.832.000,00	180.682.910,00
SUB KEG	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dokumen	1	1	156.900.000,00	128.209.115,00
SUB KEG	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Mediasi Penyelesaian Sengketa yang dilaksanakan	Kegiatan	5	5	66.932.000,00	52.473.795,00
PROGRAM	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Persen	100	100	724.498.000,00	700.154.003,00
KEGIATAN	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Jumlah Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang diterbitkan	Dokumen	20	20	724.498.000,00	700.154.003,00
SUB KEG	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah permohonan penetapan lokasi yang diproses	Dokumen	20	20	724.498.000,00	700.154.003,00
TOTAL						8.171.590.000,00	7.512.111.863,00

Dalam pencapaian sasaran terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan tentunya terdapat beberapa kendala permasalahan serta solusi yang diambil untuk mengatasinya. permasalahan yang dihadapi serta solusi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

E. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI ANTARA LAIN:

Bidang Penataan Ruang Wilayah memiliki tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan penataan ruang wilayah di Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Perda Nomor 11 Tahun 2016. Dalam melakukan tugas dan fungsinya ada beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi yaitu:

- Belum ditetapkannya Perda Revisi RTRW Provinsi Jawa Timur sebagai dokumen integrasi muatan rencana tata ruang wilayah darat dan pesisir dan pulau – pulau kecil kewenangan provinsi yang mengakomodir dinamika pembangunan terkini. Rencana Proyek Strategis Nasional, serta kebijakan pemerintah pasca ditetapkannya Undang – Undang Cipta Kerja.
- Kurangnya pemahaman terhadap muatan rencana tata ruang wilayah provinsi kepada Perangkat Daerah, serta stakeholder pembangunan terkait serta masyarakat.
- Belum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perkotaan Kabupaten/Kota, yang menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan pembangunan di daerah.
- Adanya kendala dalam penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi mengingat dinamika perubahan kondisi di lapangan yang secara simultan terjadi perubahan, antara lain perubahan status kawasan hutan, penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) di tengah fenomena perubahan pemanfaatan lahan sawah menjadi lahan terbangun, dan perubahan garis pantai.
- Belum optimalnya sinkronisasi Rencana Tata Ruang Wilayah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Jangka Pendek Daerah yang berdampak pada rendahnya efisiensi ketercapaian target pembangunan secara spasial.
- Belum optimalnya kesesuaian pemanfaatan ruang di lapangan dengan rencana tata ruang mengingat belum tersusunnya instrument pengendalian pemanfaatan ruang skala Provinsi Jawa Timur

F. SOLUSI TERHADAP PERMASALAHAN DIATAS MELALUI :

Terkait dengan kendala tersebut di atas telah dilakukan upaya perbaikan, antara lain:

- Percepatan Penetapan Revisi Perda RTRW Provinsi Jawa Timur dalam rangka persiapan permohonan persetujuan substansi kepada Menteri ATR/BPN dan persiapan penetapan Perda.
- Penguatan Forum Penataan Ruang (FPR) Provinsi Jawa Timur dalam peningkatan partisipasi dan pemahaman Perangkat Daerah, perwakilan tokoh masyarakat serta seluruh stakeholder pembangunan terkait penyelenggaraan penataan ruang.
- Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang (SITR) berbasis *website* yang mendukung penyelenggaraan penataan ruang serta menampilkan informasi tata ruang yang berkualitas, efisien, terpadu, dan transparan.
- Penyelenggaraan evaluasi dan fasilitasi penetapan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota dan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perkotaan Kabupaten/Kota dan sinkronisasi Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.
- Fasilitasi dan partisipasi Pemerintah Provinsi terhadap sinkronisasi atas kebijakan pemerintah pusat dengan memastikan kebijakan tersebut tertuang dalam muatan Revisi RTRW Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota.
- Penyusunan dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) jangka panjang, menengah, dan pendek sesuai periodisasi tahapan pembangunan sebagai upaya sinkronisasi dan paduserasi indikasi program spasial dengan rencana pembangunan sektoral Jawa Timur.
- Pendampingan dan Fasilitasi dalam Penyusunan dan Penetapan Perda RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota.
- Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang Jawa Timur yang terpadu dan berbasis spasial.
- Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang melalui pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Izin Pemanfaatan Ruang (yang diterbitkan sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang berlaku) dan penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang optimal sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

III.C. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAU KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Sasaran Strategis Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur terdiri atas tiga sasaran yaitu:

SASARAN 1: Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN	ANALISIS
Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak	Persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni	68,57%	66,93%	Tidak memenuhi target	Capaian pelayanan akses air minum dan penanganan kawasan kumuh sebagai faktor penentu capaian kinerja indikator sasaran ini tidak dapat memenuhi target yang ditetapkan

Capaian kinerja Sasaran strategis dengan indikator Persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni didukung dengan program dan kegiatan seperti yang dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.27 Analisis Program/Kegiatan Pendukung sasaran Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak Tahun 2022

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KINERJA		KETERANGAN	ANALISIS
				TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
PROGRAM	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses Air Minum yang layak	Persen	97,89	97,95	Menunjang Keberhasilan capaian kinerja	
KEGIATAN	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah RT yang terlayani akses air minum	Rumah Tangga	2400	2400		
SUB KEG	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah dokumen supervisi	dokumen	5	5		
SUB KEG	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah infrastruktur SPAM yang dibangun	unit	100	87		Dari hasil perencanaan teknis, terdapat beberapa lokasi yang tidak memiliki potensi air baku, sehingga kegiatan konstruksi fisiknya tidak dapat dilaksanakan
SUB KEG	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah infrastruktur SPAM yang dikembangkan	unit	2	2		

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KINERJA		KETERANGAN	ANALISIS
				TARGE T	REALIS ASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
SUB KEG	Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi	Jumlah orang yang mendapatkan pembinaan Pengelolaan SPAM	Orang	400	200		Kegiatan pembinaan teknis sejenis juga dilakukan dengan anggaran yang dibiayai APBN, sehingga kegiatan pembinaan teknis dilakukan sesuai kebutuhan
PROG RAM	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase sistem persampahan regional yang dikembangkan	Persen	12,19	6,22	Menunjang Keberhasilan capaian kinerja	
KEGIAT AN	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Jumlah sistem persampahan yang dikembangkan	sistem	4	4		
SUB KEG	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen persampahan	dokumen	5	4		
SUB KEG	Penyediaan Sarana dan prasarana persampahan	Jumlah infrastruktur persampahan yang terbangun	Unit	1	1		
SUB KEG	Fasilitasi Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan fasilitasi kerja sama	kab/kota	11	11		
SUB KEG	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	Jumlah Orang yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan teknis bidang persampahan	Orang	200	238		Rencana pembinaan teknis yang semula paket fullboard dilakukan menjadi fullday sesuai kebutuhan, sehingga peserta yang mengikuti kegiatan pembinaan teknis lebih banyak dari yang ditargetkan
PROG RAM	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi layak	Persen	83	81,13	Menunjang Keberhasilan capaian kinerja	
KEGIAT AN	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Jumlah jiwa yang terlayani akses air limbah	jiwa	500	0		Kegiatan fisik pembangunan infrastruktur AL tidak jadi dilaksanakan karena tidak cukup waktu lelang pelaksanaan

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KINERJA		KETERANGAN	ANALISIS
				TARGE T	REALIS ASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
SUB KEG	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah dokumen perencanaan, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	dokumen	3	3		
SUB KEG	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Jumlah infrastruktur air limbah	unit	1	0		Kegiatan fisik pembangunan infrastruktur AL tidak jadi dilaksanakan karena tidak cukup waktu lelang pelaksanaan, anggaran yang terserap adalah anggaran untuk hibah uang
SUB KEG	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah orang yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan teknis bidang air limbah domestik	Orang	150	245		Semula direncanakan mengundang 2 OPD untuk masing- masing Kab/Kota namun dalam pelaksanaannya mengundang 4 OPD untuk masing- masing Kab/Kota
PROG RAM	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase sistem drainase regional yang dikembangkan	Persen	4,17	4,17	Menunjang Keberhasilan capaian kinerja	
KEGIAT AN	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah akses drainase terbangun	meter	1.000	0		
SUB KEG	Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah orang yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan teknis bidang drainase	Orang	100	100		
SUB KEG	Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	Jumlah infrastruktur drainase	paket	10	0		tidak dilaksanakan karena tidak cukup waktu lelang (anggaran PAK), sehingga yang bisa dilaksanakan di Tahun 2022 hanya perencanaan teknisnya saja

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KINERJA		KETERANGAN	ANALISIS
				TARGE T	REALIS ASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
PROG RAM	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Presentase Penataan Bangunan Gedung	persen	100	91,67	Menunjang Keberhasilan capaian kinerja	Karena ada 4 paket pekerjaan(Pemb gedung barbuk Kejati Jatim, Pemb. Gedung BKD Tahap 2, Pemb. Gedung inspektorat Tahap 3, Pemb. masjid Islamic Center) yang belum selesai dikerjakan di Tahun Anggaran 2022, sehingga diberikan kesempatan 50 hari kalender dengan denda untuk dilaksanakan di Tahun 2023
KEGIAT AN	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	jumlah gedung yang ditetapkan dan diselenggarakan untuk kepentingan strategis daerah provinsi	gedung	48	44		Karena ada 4 paket pekerjaan(Pemb gedung barbuk Kejati Jatim, Pemb. Gedung BKD Tahap 2, Pemb. Gedung inspektorat Tahap 3, Pemb. masjid Islamic Center) yang belum selesai dikerjakan di Tahun Anggaran 2022, sehingga diberikan kesempatan 50 hari kalender dengan denda untuk dilaksanakan di Tahun 2023
SUB KEG	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah gedung yang dibangun	gedung	22	18		Karena ada 4 paket pekerjaan(Pemb gedung barbuk Kejati Jatim, Pemb. Gedung BKD Tahap 2, Pemb. Gedung inspektorat Tahap 3, Pemb. masjid Islamic Center) yang belum selesai dikerjakan di Tahun Anggaran 2022, sehingga diberikan kesempatan 50 hari kalender dengan denda untuk dilaksanakan di Tahun 2023
SUB KEG	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan	Jumlah gedung yang direhabilitasi	gedung	26	26		

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KINERJA		KETERANGAN	ANALISIS
				TARGE T	REALIS ASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Strategis Daerah Provinsi						
SUB KEG	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	Jumlah laporan bantuan teknis pembangunan bangunan gedung negara di provinsi Jawa Timur	Laporan	150	200		Realisasi melebihi target karena instansi pemohon bantuan teknis melebihi dari yang direncanakan
SUB KEG	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Provinsi	Jumlah dokumen identifikasi bangunan gedung cagar budaya	Dokumen	5	5		
SUB KEG	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	Jumlah dokumen pendataan Rumah Negara	dokumen	100	100		
PROG RAM	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	persen	20,00	20,00	Menunjang Keberhasilan capaian kinerja	
KEGIAT AN	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan yang mendapatkan penataan bangunan dan lingkungan	Kawasan	2	2		
SUB KEG	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RTBL di kawasan strategis kabupaten/ kota	dokumen	2	2		
SUB KEG	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Supervisi Penataan/Pemelihara an Bangunan dan Lingkungan (identifikasi dan penentuan lokasi RTBL)	Dokumen	2	2		
SUB KEG	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah dokumen monitoring Penataan/Pemelihara an Bangunan dan Lingkungan	Dokumen	2	2		

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KINERJA		KETERANGAN	ANALISIS
				TARGE T	REALIS ASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
PROG RAM	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pemberdayaan dan pengawasan pembinaan jasa konstruksi	Persen	100	100	Menunjang Keberhasilan capaian kinerja	
KEGIAT AN	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah orang yang mendapatkan Pemberdayaan Pembinaan jasa konstruksi	orang	1.250	1.250		
SUB KEG	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Orang yang mendapatkan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	orang	660	660		
SUB KEG	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Orang yang mendapatkan Pembinaan	orang	590	590		
KEGIAT AN	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah orang yang mendapatkan Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi	orang	2.085	2.085		
SUB KEG	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Media Informasi Jasa Konstruksi	buletin	2.000	2.000		
SUB KEG	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Jumlah Orang yang mendapatkan Pelatihan	orang	85	85		
PROG RAM	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	Persen	11,00	11,00	Menunjang Keberhasilan capaian kinerja	
KEGIAT AN	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase Kawasan Kumuh yang mendapat fasilitasi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persen	7,46	7,46		
SUB KEG	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Laporan	3	3		

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KINERJA		KETERANGAN	ANALISIS
				TARGE T	REALIS ASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
KEGIAT AN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah luasan kawasan permukiman kumuh yang ditangani	Ha	8	8		
SUB KEG	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah dokumen Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Dokumen	6	6		
SUB KEG	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah panjang PSU dibangun dalam rangka peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh	Meter	1.156	1.156		
SUB KEG	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah laporan monitoring pelaksanaan renovasi rumah tidak layak huni	dokumen	7	7		
PROG RAM	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase kegiatan mitigasi bencana yang ditangani pada wilayah perumahan dan kawasan permukiman di jatim	Persen	3	3	Menunjang Keberhasilan capaian kinerja	
KEGIAT AN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Identifikasi dan Pendataan Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Dokumen	3	3		
SUB KEG	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen	1	1		
SUB KEG	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Dokumen	1	1		

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KINERJA		KETERANGAN	ANALISIS
				TARGE T	REALIS ASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
SUB KEG	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat.	Dokumen	1	1		
PROG RAM	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Persen	21	21	Menunjang Keberhasilan capaian kinerja	
KEGIAT AN	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Jumlah kawasan permukiman yang terbangun PSU	Kawasan	22	22		
SUB KEG	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman Swadaya	Dokumen	25	25		
SUB KEG	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah panjang PSU lingkungan permukiman Swadaya yang dibangun	Meter	5.497,95	5.497,95		
SUB KEG	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman Swadaya	Laporan	17	14		
PROG RAM	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Pengujian Konstruksi dan Bahan Bangunan		82,5	83	Menunjang Keberhasilan capaian kinerja	
KEGIAT AN	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Persentase laporan hasil pengujian konstruksi dan bahan bangunan yang diinformasikan	Persen	80	100		Realisasi sub kegiatan melebihi dari target yang ditetapkan, sehingga berpengaruh kepada capaian kegiatan di akhir tahun anggaran, sehingga capaian kegiatan dianggap 100%
SUB KEG	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah pengujian yang diinformasikan	dokumen	100	220		

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KINERJA		KETERANGAN	ANALISIS
				TARGE T	REALIS ASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
PROG RAM	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan pelayanan hunian rusun yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi	rumah tangga	973	939	Menunjang Keberhasilan capaian kinerja	1. Adanya proses penertiban hunian rusunawa terkait pembayaran sewa dan keberadaan penghuni, sehingga terjadi kekosongan unit hunian 2. Beberapa unit rusunawa yang termasuk ke dalam 973 unit adalah fasum/ruko, ydan beberapa belum dimanfaatkan.
KEGIAT AN	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Persentase jumlah hunian yang dimanfaatkan dan dipelihara	Persen	100	96,5		
SUB KEG	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Rusunawa yang dikelola	rusunaw a	4	4		1. Adanya proses penertiban hunian rusunawa terkait pembayaran sewa dan keberadaan penghuni, sehingga terjadi kekosongan unit hunian 2. Beberapa unit rusunawa yang termasuk ke dalam 973 unit adalah fasum/ruko, ydan beberapa belum dimanfaatkan.

SASARAN 2: Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN	ANALISIS
Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan	Persentase kesesuaian rencana tata ruang	60%	87,60%	Melampaui target	Hasil <i>overlay</i> peta pola ruang RTRW Provinsi dengan pemanfaatan ruang terkini melalui citra terbaru menunjukkan persentase kesesuaian sebesar 87,60%

Capaian kinerja Sasaran strategis dengan indikator Persentase kesesuaian rencana tata ruang mempunyai definisi operasional perhitungan kesesuaian hasil overlay peta pola ruang (kawasan lindung dan budidaya RTRW Provinsi dengan pemanfaatan ruang terkini melalui citra terbaru. Capaian kinerja Sasaran strategis dengan indikator Persentase kesesuaian rencana tata ruang dapat melebihi target yang ditetapkan, karena didukung dengan program dan kegiatan seperti yang dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.28 Analisis Program/Kegiatan Pendukung sasaran terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan Tahun 2022

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KINERJA		KETERANGAN	ANALISIS
				TARGET	REALIS ASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
PROGRAM	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Indeks Kepuasan Layanan Informasi Tata Ruang	-	78	78	Menunjang Keberhasilan capaian kinerja	
KEGIATAN	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Persentase Kebijakan Rencana dan Program dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Persen	60	60		
SUB KEG	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Persentase Progres Penetapan Perda RTRW Provinsi	Persen	85	75		Pada Tahun 2022, Progres Penyusunan RTRW Provinsi Jawa Timur yakni Konsultasi Publik I, Integrasi dengan RZWP3K, rekomendasi peta dasar oleh BIG, Konsultasi Publik II, saat ini sedang menunggu validasi KLHS, integrasi RTRWP dan proses linsek.
SUB KEG	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Kebijakan Rencana dan Program dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	1	1		
SUB KEG	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah orang yang mendapatkan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- Undangan Bidang Penataan Ruang	Orang	100	100		

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KINERJA		KETERANGAN	ANALISIS
				TARGET	REALIS ASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
KEGIATAN	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang yang dilakukan	Kegiatan	10	69		
SUB KEG	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Teknis Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	Dokumen	10	69		Kementerian ATR/BPN, Kemenko Marves, dan Kemendagri mendorong penetapan RTR di daerah dalam rangka percepatan investasi.
KEGIATAN	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi yang dilakukan	Kegiatan	2	2		
SUB KEG	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pemanfaatan ruang daerah yang disusun	Dokumen	2	2		
SUB KEG	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Informasi Tata Ruang yang dipublikasikan	Konten	10	10		
PROGRAM	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase dokumen Penatagunaan Tanah yang tersusun	Persen	62	62	Menunjang Keberhasilan capaian kinerja	
KEGIATAN	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah	Dokumen	2	2		
SUB KEG	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah	Kegiatan	2	2		
PROGRAM	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Presentase fasilitasi penyelesaian sengketa, konflik dan perkara pertanahan dalam 1 (satu) daerah Provinsi	persen	100	100	Menunjang Keberhasilan capaian kinerja	
KEGIATAN	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang terfasilitasi	Kasus	10	10		

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KINERJA		KETERANGAN	ANALISIS
				TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
SUB KEG	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dokumen	1	1		
SUB KEG	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Mediasi Penyelesaian Sengketa yang dilaksanakan	Kegiatan	5	5		
PROGRAM	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Persen	100	100	Menunjang Keberhasilan capaian kinerja	
KEGIATAN	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Jumlah Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang diterbitkan	Dokumen	20	20		
SUB KEG	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah permohonan penetapan lokasi yang diproses	Dokumen	20	20		

SASARAN 3: Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN	ANALISIS
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah	86,84%	84,37%	Tidak memenuhi target	Jumlah indeks profesional pegawai sebagai faktor penentu tercapainya indikator sasaran ini tidak memenuhi target sehingga menyebabkan tidak tercapainya capaian kinerja sasaran ini

Capaian kinerja Sasaran strategis Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikator Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah tidak dapat memenuhi target yang ditetapkan, dikarenakan jumlah indeks profesional pegawai (IPP) bernilai rendah, hal ini dikarenakan kurangnya diklat teknis yang diikuti oleh ASN dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Jawa Timur.

Sasaran strategis dengan indikator nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah didukung dengan program dan kegiatan seperti yang dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.29 Analisis Program/Kegiatan Pendukung sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Tahun 2022

KO DE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KINERJA		KETERA NGAN	ANALISIS	UNIT
				TARGET	REALISA SI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PR OG RA M	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Profesionalitas ASN		80	84,52	Menunj ang Keberha silan capaian kinerja		SEKR ETAR IAT
		Persentase realisasi anggaran	Persen	90	88,17	Menunj ang Keberha silan capaian kinerja	Secara garis besar realisasi anggaran yang tidak mencapai target disebabkan oleh adanya beberapa kegiatan pembangunan yang tidak memiliki cukup waktu dalam pelaksanaan pembangunan fisik. Hal tersebut disebabkan oleh tahapan penetapan DPPA P-APBD 2022 yang baru dilaksanakan di bulan Oktober 2022 sehingga beberapa kegiatan pembangunan yang direncanakan di APBD Perubahan tahun 2022 hanya dapat dilaksanakan perencanaannya saja, karena untuk proses pengadaan sampai dengan pelaksanaan pembangunan konstruksi memerlukan waktu yang cukup panjang, dengan hanya sisa waktu dua bulan tidak dimungkinkan untuk membangun konstruksi fisiknya, hal tersebut menyebabkan adanya sisa anggaran yang cukup besar.	
		Persentase indikator program yang tercapai	Persen	90,24	72,22	Menunj ang Keberha silan capaian kinerja		

KO DE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KINERJA		KETERA NGAN	ANALISIS	UNIT
				TARGET	REALISA SI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KEG IAT AN	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	Dokumen	7				SUNG RAM
		Jumlah Dokumen Pelaporan Perangkat Daerah	Dokumen	4				
SUB KEG	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	7				SUNG RAM
SUB KEG	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA	Dokumen	1				SUNG RAM
SUB KEG	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan	Dokumen	1				SUNG RAM
SUB KEG	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA	Dokumen	1				SUNG RAM
SUB KEG	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan	Dokumen	1				SUNG RAM
SUB KEG	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja	Dokumen	5				SUNG RAM
SUB KEG	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	Dokumen	4				SUNG RAM
KEG IAT AN	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	12	12			TU
SUB KEG	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan BMD SKPD	laporan	12	12			TU
SUB KEG	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan	Laporan	1	1			TU
SUB KEG	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Kegiatan dan Laporan	Laporan	4	4			TU
SUB KEG	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan	laporan	2	2			TU
KEG IAT AN	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	Laporan	3	3			TU
SUB KEG	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	paket	12	12			TU
SUB KEG	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Laporan	12	12			TU
SUB KEG	Koordinasi dan Pelaksanaan	Jumlah Laporan Data Pegawai	Laporan	12	12			TU

KO DE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KINERJA		KETERA NGAN	ANALISIS	UNIT
				TARGET	REALISA SI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sistem Informasi Kepegawaian							
SUB KEG	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan SKP yang tepat waktu	Laporan	12	12			TU
SUB KEG	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	laporan	1	1			TU
KEG IAT AN	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	Dokumen	11	11			TU
SUB KEG	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Pengadaan	Paket	1	1			TU
SUB KEG	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Pengadaan	Paket	1	1			TU
SUB KEG	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Pengadaan	Paket	1	1			TU
SUB KEG	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket pengadaan	Paket	1	1			TU
SUB KEG	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Pengadaan	Paket	1	1			TU
SUB KEG	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah paket pengadaan	Paket	1	1			TU
SUB KEG	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Paket Pengadaan	Paket	40	40			TU
SUB KEG	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan	Laporan	1	1			TU
SUB KEG	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Daftar Arsip Aktif	Dokumen	3	0			TU
KEG IAT AN	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana	Laporan	11	11			TU
SUB KEG	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan	Unit	2	2			TU
SUB KEG	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Paket	1	1			TU
KEG IAT AN	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan	12	12			TU
SUB KEG	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman Surat/Dokumen	paket	1	1			TU

KO DE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KINERJA		KETERA NGAN	ANALISIS	UNIT
				TARGET	REALISA SI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SUB KEG	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12			TU
SUB KEG	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa	Paket	8	8			TU
KEG IAT AN	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan aset tetap yang terpelihara	laporan	12	12			TU
SUB KEG	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa	Paket	1				TU
SUB KEG	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	paket	8				TU
SUB KEG	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	Paket	1				TU
SUB KEG	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung yang dipelihara	paket	1				TU
KEG IAT AN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggung jawaban keuangan	Dokumen	12				TU
SUB KEG	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	Dokumen	12				TU
SUB KEG	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan	12				TU
SUB KEG	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Verifikasi Penatausahaan	laporan	12				TU
SUB KEG	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan akuntansi perangkat daerah	laporan	12				TU
SUB KEG	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen keuangan SKPD	Dokumen	2				TU
SUB KEG	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen tanggapan atas LHP	Dokumen	1				TU
SUB KEG	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan	laporan	12				TU
SUB KEG	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis	laporan	1				TU

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KINERJA		KETERA NGAN	ANALISIS	UNIT
				TARGET	REALISA SI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KEG IAT AN	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	dokumen	12				TU
SUB KEG	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Retribusi	Laporan	12				TU
PR OG RA M	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai	Persen	90,24	72,22	Menunj ang Keberha silan capaian kinerja		TU UPT
		Persentase realisasi anggaran	Persen	90	88,17	Menunj ang Keberha silan capaian kinerja	Secara garis besar realisasi anggaran yang tidak mencapai target disebabkan oleh adanya beberapa kegiatan pembangunan yang tidak memiliki cukup waktu dalam pelaksanaan pembangunan fisik. Hal tersebut disebabkan oleh tahapan penetapan DPPA P- APBD 2022 yang baru dilaksanakan di bulan Oktober 2022 sehingga beberapa kegiatan pembangunan yang direncanakan di APBD Perubahan tahun 2022 hanya dapat dilaksanakan perencanaannya saja, karena untuk proses pengadaan sampai dengan pelaksanaan pembangunan konstruksi memerlukan waktu yang cukup panjang, dengan hanya sisa waktu dua bulan tidak dimungkinkan untuk membangun konstruksi fisiknya, hal tersebut menyebabkan adanya sisa anggaran yang cukup besar.	
		Indeks Profesionalitas ASN		80	84,52	Menunj ang Keberha silan capaian kinerja		
KEG IAT AN	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	dokumen	11	11			TU UPT
SUB KEG	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Pengadaan	Paket	1	1			TU UPT

KO DE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KINERJA		KETERA NGAN	ANALISIS	UNIT
				TARGET	REALISA SI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SUB KEG	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Pengadaan	Paket	1	1			TU UPT
SUB KEG	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Pengadaan	Paket	1	1			TU UPT
SUB KEG	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Paket Pengadaan	Paket	1	1			TU UPT
SUB KEG	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket Pengadaan	Paket	1	1			TU UPT
SUB KEG	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan	Laporan	1	1			TU UPT
KEG IAT AN	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana	Laporan	11	11			TU UPT
SUB KEG	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Paket	1	1			TU UPT
KEG IAT AN	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan	12	12			TU UPT
SUB KEG	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman Surat/Dokumen	Paket	1	1			TU UPT
SUB KEG	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa	Paket	1	1			TU UPT
KEG IAT AN	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan aset tetap yang terpelihara	laporan	12	12			TU UPT
SUB KEG	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa	paket	1	1			TU UPT
SUB KEG	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	paket	1	1			TU UPT
SUB KEG	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	Paket	1	1			TU UPT
KEG IAT AN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Pertanggungjawaban keuangan	Dokumen	12	12			TU UPT
SUB KEG	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan	12	12			TU UPT

III.C. REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun 2022, realisasi anggaran untuk semua program pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya adalah sebesar Rp 1,270,825,427,218.98 dari total anggaran belanja langsung sebesar Rp 1,441,314,793,000.00 atau terealisasi sebesar 88,17%. Pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu tahun 2022 yang tertuang di dalam DPA SKPD Tahun 2022 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DPPA – SKPD (P. APBD) Tahun 2022, Provinsi Jawa Timur dengan perincian kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.30. Capaian PAD Tahun 2022

KODE REKENING					URAIAN	ANGGARAN P-APBD 2022	REALISASI	
							RP	%
1					2	3	4	5
1	03	0	0	0	PENDAPATAN DAERAH	2,500,000,000.00	6,830,936,616.91	273.24
1	03	00	000	00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2,500,000,000.00	6,830,936,616.91	273.24
1	03	00	000	00	Retribusi Daerah	2,175,000,000.00	2,006,476,150.00	92.25
1	03	00	000	00	Lain-lain PAD yang Sah	325,000,000.00	4,824,460,466.91	1484.45
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH						2,500,000,000.00	6,830,936,616.91	273.24

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov. Jatim

Tabel 3.31 Akuntabilitas Keuangan Tahun 2022

KODE REKENING					URAIAN	ANGGARAN P.APBD	REALISASI	
							RP	%
1					2	3	4	5
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	58,316,892,175.00	54,789,552,298.00	93.95
1	03	01	101		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,921,518,420.00	1,878,236,766.00	97.75
1	03	01	101	01	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	24,930,000.00	24,873,597.00	99.77
1	03	01	101	02	<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD</i>	14,100,198.00	13,961,160.00	99.01
1	03	01	101	03	<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	14,092,000.00	13,961,160.00	99.07
1	03	01	101	04	<i>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</i>	16,620,248.00	16,371,525.00	98.50
1	03	01	101	05	<i>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD</i>	16,620,248.00	16,576,320.00	99.74
1	03	01	101	06	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	1,784,807,726.00	1,742,379,099.00	97.62
1	03	01	101	07	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	50,348,000.00	50,113,905.00	99.54
1	03	01	102		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	39,182,110,500.00	36,901,004,394.00	94.18
1	03	01	102	01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	37,142,611,000.00	34,978,092,682.00	94.17
1	03	01	102	02	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	808,569,500.00	756,698,200.00	93.58
1	03	01	102	03	<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	484,787,975.00	448,539,992.00	92.52
1	03	01	102	04	<i>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>	283,184,000.00	260,298,244.00	91.92
1	03	01	102	05	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	209,129,025.00	205,681,050.00	98.35
1	03	01	102	06	<i>Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan</i>	2,060,000.00	1,997,000.00	96.94
1	03	01	102	07	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	249,709,000.00	247,637,226.00	99.17
1	03	01	102	08	<i>Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>	2,060,000.00	2,060,000.00	100.00
1	03	01	103		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	38,248,000.00	28,102,300.00	73.47
1	03	01	103	01	<i>Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>	7,350,000.00	4,284,800.00	58.30
1	03	01	103	03	<i>Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD</i>	1,880,000.00	0.00	0.00
1	03	01	103	05	<i>Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	5,900,000.00	1,340,000.00	22.71
1	03	01	103	06	<i>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	23,118,000.00	22,477,500.00	97.23
1	03	01	104		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	130,992,500.00	127,919,872.00	97.65
1	03	01	104	07	<i>Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah</i>	130,992,500.00	127,919,872.00	97.65
1	03	01	105		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1,338,117,500.00	1,226,198,750.00	91.64
1	03	01	105	01	<i>Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</i>	1,225,480,500.00	1,179,708,750.00	96.26
1	03	01	105	03	<i>Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	2,267,000.00	1,340,000.00	59.11
1	03	01	105	04	<i>Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>	2,540,000.00	1,340,000.00	52.76

KODE REKENING					URAIAN	ANGGARAN P.APBD	REALISASI	
							RP	%
1					2	3	4	5
1	03	01	105	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	7,830,000.00	1,310,000.00	16.73
1	03	01	105	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100,000,000.00	42,500,000.00	42.50
1	03	01	106		Administrasi Umum Perangkat Daerah	6,007,518,480.00	5,664,965,484.00	94.30
1	03	01	106	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	26,457,067.00	21,441,589.00	81.04
1	03	01	106	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2,724,689,715.00	2,606,712,878.00	95.67
1	03	01	106	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	112,391,936.00	105,856,042.00	94.18
1	03	01	106	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	147,987,876.00	128,634,272.00	86.92
1	03	01	106	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	150,320,568.00	138,690,939.00	92.26
1	03	01	106	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	53,092,500.00	52,121,750.00	98.17
1	03	01	106	07	Penyediaan Bahan/Material	58,150,021.00	46,220,222.00	79.48
1	03	01	106	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	44,835,000.00	44,778,750.00	99.87
1	03	01	106	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2,681,973,797.00	2,520,509,042.00	93.98
1	03	01	106	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7,620,000.00	0.00	0.00
1	03	01	107		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,533,730,500.00	1,422,404,750.00	92.74
1	03	01	107	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	734,400,000.00	728,200,000.00	99.16
1	03	01	107	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0.00	0.00	0.00
1	03	01	107	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	799,330,500.00	694,204,750.00	86.85
1	03	01	108		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6,855,134,104.00	6,357,318,282.00	92.74
1	03	01	108	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12,500,000.00	3,739,250.00	29.91
1	03	01	108	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	738,878,628.00	697,734,321.00	94.43
1	03	01	108	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6,103,755,476.00	5,655,844,711.00	92.66
1	03	01	109		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,309,522,171.00	1,183,401,700.00	90.37
1	03	01	109	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	473,905,671.00	413,046,425.00	87.16
1	03	01	109	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33,600,000.00	20,461,357.00	60.90
1	03	01	109	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	177,296,500.00	160,544,939.00	90.55
1	03	01	109	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	599,720,000.00	564,391,628.00	94.11
1	03	01	109	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25,000,000.00	24,957,351.00	99.83

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN P.APBD	REALISASI	
						RP	%
1				2	3	4	5
1	03	03		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	181,972,352,954.00	145,768,858,318.00	80.10
1	03	03	101	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	181,972,352,954.00	145,768,858,318.00	80.10
1	03	03	101	02 <i>Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM</i>	16,858,707,874.00	11,768,094,912.00	69.80
1	03	03	101	03 <i>Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan</i>	101,152,999,000.00	94,891,311,171.00	93.81
1	03	03	101	05 <i>Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan</i>	63,438,682,575.00	39,002,366,825.00	61.48
1	03	03	101	08 <i>Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi</i>	521,963,505.00	107,085,410.00	20.52
1	03	04		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	5,292,589,770.00	3,111,204,440.00	58.78
1	03	04	101	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	5,292,589,770.00	3,111,204,440.00	58.78
1	03	04	101	01 <i>Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi</i>	2,327,137,470.00	2,268,389,852.00	97.48
1	03	04	101	06 <i>Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan</i>	295,398,000.00	295,398,000.00	100.00
1	03	04	101	07 <i>Fasilitas Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota</i>	2,000,000,000.00	327,177,648.00	16.36
1	03	04	101	08 <i>Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan</i>	670,054,300.00	220,238,940.00	32.87
1	03	05		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	8,982,630,184.00	8,029,632,065.00	89.39
1	03	05	101	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	8,982,630,184.00	8,029,632,065.00	89.39
1	03	05	101	01 <i>Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik</i>	2,241,377,000.00	1,820,173,765.00	81.21
1	03	05	101	03 <i>Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat</i>	6,563,961,000.00	6,035,738,000.00	91.95
1	03	05	101	06 <i>Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik</i>	177,292,184.00	173,720,300.00	97.99
1	03	06		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	141,467,391,092.00	132,548,481,640.00	93.70
1	03	06	101	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	141,467,391,092.00	132,548,481,640.00	93.70
1	03	06	101	03 <i>Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan</i>	89,746,092.00	75,500,000.00	84.13
1	03	06	101	05 <i>Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya</i>	141,377,645,000.00	132,472,981,640.00	93.70
1	03	07		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	6,343,628,625.00	5,686,779,234.00	89.65
1	03	07	101	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	6,343,628,625.00	5,686,779,234.00	89.65
1	03	07	101	02 <i>Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi</i>	6,343,628,625.00	5,686,779,234.00	89.65

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN P.APBD	REALISASI	
						RP	%
1				2	3	4	5
1	03	08		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	429,978,535,775.00	332,752,474,069.00	77.39
1	03	08	101	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	429,978,535,775.00	332,752,474,069.00	77.39
1	03	08	101	01 <i>Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi</i>	323,717,921,000.00	229,652,384,717.00	70.94
1	03	08	101	02 <i>Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi</i>	27,195,000,000.00	24,983,831,165.00	91.87
1	03	08	101	04 <i>Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi</i>	46,284,722,000.00	45,915,500,436.00	99.20
1	03	08	101	05 <i>Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Provinsi</i>	1,000,000,000.00	924,760,147.00	92.48
1	03	08	101	10 <i>Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara</i>	31,780,892,775.00	31,275,997,604.00	98.41
1	03	09		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1,675,000,000.00	1,146,954,175.00	68.47
1	03	09	101	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1,675,000,000.00	1,146,954,175.00	68.47
1	03	09	101	01 <i>Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>	1,600,000,000.00	1,123,652,300.00	70.23
1	03	09	101	02 <i>Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan</i>	50,000,000.00	5,525,875.00	11.05
1	03	09	101	07 <i>Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan</i>	25,000,000.00	17,776,000.00	71.10
1	03	11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	4,230,935,425.00	3,575,541,578.00	84.51
1	03	11	101	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	3,214,728,400.00	2,764,052,713.00	85.98
1	03	11	101	04 <i>Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi</i>	2,364,827,900.00	2,141,021,663.00	90.54
1	03	11	101	07 <i>Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi</i>	849,900,500.00	623,031,050.00	73.31
1	03	11	102	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	1,016,207,025.00	811,488,865.00	79.85
1	03	11	102	01 <i>Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi</i>	261,329,700.00	223,962,775.00	85.70
1	03	11	102	03 <i>Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI</i>	221,532,125.00	155,477,000.00	70.18
1	03	11	102	05 <i>Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi</i>	533,345,200.00	432,049,090.00	81.01
1	03	12		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	9,198,070,000.00	8,693,500,347.00	94.51
1	03	12	101	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	2,870,108,000.00	2,667,511,708.00	92.94
1	03	12	101	01 <i>Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi</i>	2,361,848,000.00	2,187,540,882.00	92.62
1	03	12	101	03 <i>Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang</i>	393,660,000.00	381,086,686.00	96.81

KODE REKENING					URAIAN	ANGGARAN P.APBD	REALISASI	
							RP	%
1					2	3	4	5
1	03	12	101	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- Undangan Bidang Penataan Ruang	114,600,000.00	98,884,140.00	86.29
1	03	12	102		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	828,000,000.00	794,134,700.00	95.91
1	03	12	102	03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	828,000,000.00	794,134,700.00	95.91
1	03	12	103		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1,295,552,000.00	1,240,419,558.00	95.74
1	03	12	103	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1,018,400,000.00	967,751,712.00	95.03
1	03	12	103	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	277,152,000.00	272,667,846.00	98.38
1	03	12	104		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	4,204,410,000.00	3,991,434,381.00	94.93
1	03	12	104	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	437,550,000.00	391,083,645.00	89.38
1	03	12	104	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	80,000,000.00	70,372,491.00	87.97
1	03	12	104	03	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	78,000,000.00	70,580,552.00	90.49
1	03	12	104	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	3,608,860,000.00	3,459,397,693.00	95.86
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	300,000,000.00	298,383,000.00	99.46
1	04	02	101		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	300,000,000.00	298,383,000.00	99.46
1	04	02	101	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	100,000,000.00	99,450,000.00	99.45
1	04	02	101	02	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	100,000,000.00	99,555,000.00	99.56
1	04	02	101	06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	100,000,000.00	99,378,000.00	99.38
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	46,930,633,690.00	46,586,392,818.00	99.27
1	04	03	101		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	509,408,390.00	422,344,780.00	82.91
1	04	03	101	09	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	509,408,390.00	422,344,780.00	82.91
1	04	03	102		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	46,421,225,300.00	46,164,048,038.00	99.45
1	04	03	102	01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	245,000,000.00	228,537,400.00	93.28
1	04	03	102	04	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	40,700,000,000.00	40,696,475,000.00	99.99

KODE REKENING					URAIAN	ANGGARAN P.APBD	REALISASI	
							RP	%
1					2	3	4	5
1	04	03	102	07	<i>Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha</i>	5,476,225,300.00	5,239,035,638.00	95.67
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	544,563,003,310.00	525,992,231,831.98	96.59
1	04	05	101		Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	544,563,003,310.00	525,992,231,831.98	96.59
1	04	05	101	01	<i>Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman</i>	2,526,000,000.00	2,261,728,100.00	89.54
1	04	05	101	02	<i>Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman</i>	540,016,680,760.00	522,361,943,706.98	96.73
1	04	05	101	03	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman</i>	2,020,322,550.00	1,368,560,025.00	67.74
2	10	03			PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	724,498,000.00	700,154,003.00	96.64
2	10	03	101		Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	724,498,000.00	700,154,003.00	96.64
2	10	03	101	01	<i>Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum</i>	724,498,000.00	700,154,003.00	96.64
2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	223,832,000.00	180,682,910.00	80.72
2	10	04	101		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	223,832,000.00	180,682,910.00	80.72
2	10	04	101	01	<i>Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>	156,900,000.00	128,209,115.00	81.71
2	10	04	101	02	<i>Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>	66,932,000.00	52,473,795.00	78.40
2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	1,114,800,000.00	964,604,492.00	86.53
2	10	10	101		Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1,114,800,000.00	964,604,492.00	86.53
2	10	10	101	01	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah</i>	1,114,800,000.00	964,604,492.00	86.53
JUMLAH BELANJA DAERAH						1,441,314,793,000.00	1,270,825,427,218.98	88.17

III.D. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2021

Berdasarkan hasil evaluasi implementasi SAKIP Tahun 2021 yang telah disampaikan sebelumnya, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur telah berusaha melakukan tindak lanjut guna perbaikan-perbaikan yang lebih baik ke depannya. Beberapa perbaikan sebagai bentuk tindak lanjut hasil evaluasi yang dilakukan di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja pelayanan publik melalui perubahan Budaya Kinerja, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur selain berupaya mempertahankan keberhasilan prestasi kinerja yang sudah tercapai, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur juga berupaya meningkatkan keterpaduan pelaksanaan program/kegiatan, berupa komitmen bersama mulai antar unit kerja maupun dengan instansi maupun Perangkat Daerah lain yang terkait yang dilaksanakan secara holistik dan spasial. Tentunya dalam pencapaian kinerja khususnya yang tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur perlu dilakukan sinergi pelaksanaan program/kegiatan bersama pihak lain seperti dengan pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat, lintas sektor dengan perangkat daerah lain agar dapat mengoptimalkan hasil pencapaian kinerjanya. Melalui kegiatan Rakortek, penjangkaran program/kegiatan, *updating* data dan koordinasi internal antar instansi, diharapkan tidak akan terjadi tumpang tindih kebijakan program/kegiatan sehingga apa yang dilaksanakan akan menjadi lebih maksimal.
2. Menerapkan *Performance Based Organization* dengan menjadikan Renstra Tahun 2019-2024 sebagai acuan dalam membangun Organisasi. Apabila diperlukan, perlu dilakukan pemutakhiran perencanaan menyesuaikan dengan kondisi terkini. Dalam setiap tahunnya Rentra Dinas selalu dilakukan review guna mengevaluasi perlu atau tidaknya dilakukan *updating* dengan menyesuaikan pada kondisi terkini. Kebijakan, target sasaran, Program/kegiatan bahkan sampai dengan kebutuhan anggaran menjadi terkoreksi mengikuti kondisi yang dibutuhkan saat itu. Namun tujuan dan arah pembangunan tetap mengacu pada terciptanya peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat Jawa Timur. Bahkan bukan hanya pada Renstra yang terjadi pemutakhiran, Renja dan dokumen pelaksana juga akan mengalami penyesuaian, agar dinas tidak salah mengambil kebijakan terkait pembangunan di masyarakat. Karena dalam melaksanakan segala proses pembangunan, sebuah

acuan kerja yaitu Renja dan Renstra yang update sesuai kondisi terkini adalah mutlak sangat dibutuhkan.

3. Lebih mendorong penerapan budaya kinerja dengan menyusun indikator kinerja individu yang selaras dengan kinerja organisasi serta dijadikan acuan dalam penyusunan SKP. Setiap ASN di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur sudah dan wajib menandatangani Perjanjian Kinerja masing-masing individu yang isinya berupa indikator kinerja individu yang selaras dengan kinerja organisasi serta dijadikan acuan dalam penyusunan SKP.
4. Kepala Dinas memastikan pada setiap jenjang jabatan selalu dilakukan *monitoring*, mengukur, menagih dan menyimpulkan kinerja sebagaimana yang disepakati pada tiap tingkatan. Pemanfaatan TI yang telah ada melalui aplikasi E-Master, Setiap ASN di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur sudah dilakukan *monitoring* terhadap kinerja yang di capai oleh mereka. Setiap ASN juga sudah di bekali dengan fasilitas pendukung agar pelaksanaan kerja menjadi lebih maksimal. Setiap pimpinan langsung ASN terkait juga selalu melakukan *control*, sehingga masing-masing ASN dapat terarah dengan baik sesuai dengan perjanjian kinerja yang sudah disepakatinya.
5. Meningkatkan kapasitas SDM dalam hal implementasi dan evaluasi akuntabilitas manajemen kinerja di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur terutama pada level UPT. Di masing-masing bidang dan UPT, sudah ada upaya peningkatan kapasitas SDM bagi ASN Dinas. Di Sekretariat dinas pun sudah di siapkan satu kegiatan khusus yaitu pada Program Pelayanan Kesekretariatan dengan kegiatan Ketatausahaan dan Kepegawaian di mana dalam kegiatan ini ada sub kegiatan yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia ASN Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur.
6. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur berupaya senantiasa melakukan upaya inovasi untuk melakukan peningkatan capaian kinerja secara berkelanjutan. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur juga selalu berupaya meningkatkan pelayanannya sehingga target-target kinerja dapat tercapai dengan maksimal. Banyak upaya yang dilaksanakan di antaranya dengan peningkatan SDM dan juga menghadirkan inovasi- inovasi baru dalam pelayanan. Di antaranya adalah penggunaan aplikasi-aplikasi dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu yang ada yaitu aplikasi SIBANTEK, yang mana aplikasi ini digunakan oleh

pekerja-pekerja konstruksi yang akan melaksanakan asistensi kepada dinas untuk mendapatkan masukan teknis terkait pembangunan gedung. Aplikasi ini akan mempermudah para pekerja konstruksi dalam memperoleh rekomendasi teknis dari ASN yang melaksanakan asistensi sehingga proses pembangunan gedung-gedung negara dapat terlaksana dengan baik

PENUTUP

Dari uraian permasalahan dan program pembangunan urusan perumahan dan kawasan permukiman, serta penataan ruang dan pertanahan di Jawa Timur, antara lain dapat disimpulkan bahwa capaian pelayanan bidang Air Minum 97,95% untuk kenaikan capaian tahun 2022 bisa melebihi target karena adanya kolaborasi pendanaan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Daerah dan CSR, capaian Sanitasi 81,13% belum sesuai target karena terkendala provinsi belum memiliki RISPAL sampai dengan tahun 2022. Untuk memenuhi kebutuhan sesuai capaian pelayanan sampai dengan 2022 sesuai target ideal berdasarkan SDGs maupun GNPSR diperlukan dana yang sangat besar sedangkan berdasarkan kemampuan alokasi pendanaan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota secara rata-rata maksimum hanya $\pm 15\%$ dari total kebutuhan dana. Dengan demikian target capaian pelayanan bidang permukiman sampai dengan akhir periode perencanaan tahun 2022 dijustifikasi secara realistis hanya 15% dari target ideal. Selain itu permasalahan perumahan dan permukiman tidak cukup hanya diselesaikan melalui manajemen pembangunan infrastruktur, namun perlu didukung dengan manajemen konservasi lingkungan untuk mempertahankan sumber daya alam melalui penataan ruang secara komprehensif.

Berdasarkan komposisi alokasi dana pemerintah pada 2 tahun terakhir, maka guna menjamin konsistensi terlaksananya program sesuai dokumen perencanaan pembangunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur 2019-2024 perlu didukung dengan komitmen pendanaan pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta juga perlu dipikirkan skema pendanaan oleh swasta dan partisipasi masyarakat. Untuk selanjutnya LKj-IP ini juga merupakan sarana evaluasi dan pengendalian yang sangat efektif agar pelaksanaan pembangunan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, merupakan landasan dan pedoman guna penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur di tahun berikutnya. Dengan demikian perlu dilakukan sinkronisasi dengan Rencana Strategis bidang permukiman yang disusun oleh dinas terkait pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun kesimpulan Capaian Tujuan, Sasaran dan Indikator dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni dengan target 69,80% terealisasi sebesar 66,28% atau dengan capaian 94,96% termasuk dalam katagori baik. Realisasi sasaran persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni sebesar 66,28% didukung oleh 16 (enam belas) program yang mendukung tercapainya target tersebut yaitu:
 - 1) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 - 2) Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
 - 3) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
 - 4) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
 - 5) Program Pengembangan Permukiman
 - 6) Program Penataan Bangunan Gedung
 - 7) Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
 - 8) Program Pengembangan Jasa Konstruksi
 - 9) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - 10) Program Pengembangan Perumahan
 - 11) Program Kawasan Permukiman
 - 12) Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)
 - 13) Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
 - 14) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
 - 15) Program Penatagunaan Tanah
 - 16) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

2. Sasaran persentase kesesuaian rencana tata ruang dengan target 88,00% terealisasi sebesar 92,53% atau dengan capaian 105,15% termasuk dalam katagori sangat baik. Realisasi sasaran persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni sebesar 92,53% didukung oleh 4 (empat) program yang mendukung tercapainya target tersebut yaitu:
 - 1). Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - 2). Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
 - 3). Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
 - 4). Program Penatagunaan Tanah

3. Sasaran Nilai Evaluasi Layanan implementasi SAKIP perangkat daerah dengan target 87,59%. sedangkan realisasi 85,11% atau tercapai 97,17% termasuk kategori baik. Realisasi sasaran persentase Nilai Evaluasi Layanan implementasi SAKIP perangkat daerah sebesar 87,59% didukung oleh 1 (satu) program yang mendukung tercapainya target tersebut yaitu, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Semoga LKj-IP ini dapat memberikan manfaat bagi segenap pelaksanaan pembangunan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu masukan dan saran terhadap penyusunan LKj-IP ini sangat diharapkan untuk penyempurnaan pada masa mendatang.